



# LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI BANTUL 400172

• TAHUNAN TAHUN 2025 •



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Kata Pengantar

---



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Implikasinya, pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, melainkan juga meliputi seluruh aset yang dimiliki oleh negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sebagai bagian penting dari kekayaan negara, BMN harus dikelola secara efektif dan efisien demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pengelolaan BMN sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini disebabkan BMN adalah salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus terintegrasi dan transparan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN, Pengadilan Negeri Bertul, selaku salah satu unit Kuasa Pengguna Barang, berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. LBKP Pengadilan Negeri Bertul Semester II Tahun Anggaran 2025 ini berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Bertul Semester II Tahun Anggaran 2025 ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonstruksi Barang Milik Negara.



Dengan selesainya penyusunan LKRP Pendidikan Negeri Rantau Tahunan Tahun 2021, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami pendidikan BMN di Pendidikan Negeri Rantau. Laporan ini juga diharapkan bermanfaat bagi pimpinan Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pendidikan BMN.

Barru, 27 Januari 2021

Sekretaris Pendidikan Negeri Rantau



DR. H. H. H. H.



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Daftar Isi

---



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	2
B. Esensi Pelaporan	5
C. Periode Pelaporan	5
II. KEBERAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	5
A. Kebijakan Penyragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodifikasi	7
B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar	10
C. Kebijakan Kapiteisasi BMN	11
D. Kebijakan Penyusutan BMN	12
E. Kebijakan Ekonsultasi Nilai BMN	14
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	15
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023	16
A. Saldo Awal	16
B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Semester II Tahun Anggaran 2023	16
V. BMN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL PER 31 DESEMBER 2023	31
A. BMN per Akun Negara	31
B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan	32
VI. INFORMASI BMN LAINNYA	32
A. Perkembangan Nilai BMN	32
B. Informasi Pengelolaan BMN	33
C. BMN Dari Dana Dekonsentrasi	35
D. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum	35
E. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain	36
F. BMN Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusnya kepada Pengelola Barang	36
G. BMN Berupa SP/SDG	36
H. Usulan Barang Hibah SK/TP	36
I. Asst Properti Investasi	36
J. Permasalahan Pelaksanaan Tatausahakan BMN	36
K. Pengungkapan Penting Lainnya	36



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Daftar Lampiran

---



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran Laporan Barang Pengguna :

1. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data BMN
2. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
3. Laporan Posisi BMN Di Neraca per 31 Desember 2025
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomtabel
6. Laporan Barang Ekstrakomtabel
7. Laporan Barang Cabang Intrakomtabel & Ekstrakomtabel
8. Laporan Penyusutan Intrakomtabel
9. Laporan Penyusutan Ekstrakomtabel
10. Laporan CRBMN
11. Catatan Atas Laporan BMN
12. Laporan PMSB
13. Laporan Pelaksanaan Penganggaran BMN
14. Laporan BMN Berupa Rumah Negara
15. Neraca Tingkat Setor per 31 Desember 2025
16. Neraca Percobaan (Basis Akrual)
17. Neraca Percobaan (Basis Kas)



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Berita Acara Rekonsiliasi Internal

---



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soeparno, 39 No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55131, Telp/Fax: 0274-347048  
Laman: www.pn-korwil.yogyakarta.go.id / www.pn-korwil.bantul.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MELK NEGARA  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : 88/SEK.PN.WI/13-US/PL.1.3/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Pengadilan Negeri Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Prasetyo, S.T  
NP : 1985124-201801-1-005  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Negeri Bantul, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Prasetyo, S.T  
NP : 1985124-201801-1-005  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Negeri Bantul, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Melk Negara (RDM) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Bantul dengan cara membandingkan data RDM pada Laporan Barang Kusus Pengguna (LBK) yang dibuatkan oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kusus Pengguna Anggaran (LKOKPA) yang dibuatkan oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data RDM

No	Aksi Neraca	Nilai RDM Periode Semester I Tahun Anggaran 2023		
		Saldo Awal	Mula	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	POSISI RDM Di NEGERA	21.595.234.530	(1.447.732.832)	20.147.501.698
A.	ASET LANCAR	19.891.300	3.848.544	23.739.844
1	Persediaan	19.891.300	2.585.515	22.476.815
B.	ASET TETAP	11.703.934.530	(1.450.291.310)	10.253.643.220
1	Tanah	11.039.698.300	0	11.039.698.300
2	Peralatan dan Meubel	3.595.233.700	(1.241.000)	2.354.232.700
3	Gedung dan Bangunan	1.965.138.530	0	1.965.138.530
4	Jalan, Trotoar dan Arangan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	49.347.900	0	49.347.900
6	Perabotan dan Peralengkapan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.212.854.170)	(1.452.031.140)	(7.664.885.310)
C.	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Hendak-hendak dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
1	RUMAH NEGARA	19.794.835,00	(3.345.230)	16.449.605
A.	Ekstrakompasibel	11.998.878	(3.345.230)	8.653.648
1	Sifat Ekstrakompasibel	11.679.150	0	11.679.150
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakompasibel	(317.972.172)	(3.345.230)	(318.318.402)
B.	DPNSD	0	0	0
C.	SAKAWI MELANG	0	0	0
D.	SAKAWI PUSAT BERAS	0	0	0
	TOTAL (3 + 5)	21.738.628.434	(1.451.140.892)	20.287.487.542

5. Hal-hal penting lainnya mengenai data BBN terkait penyusunan LRP dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BBN dan LRP periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat ketidakakuratan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Plakat Pertama



Plakat

Plakat Kedua



Plakat





Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Rekapitulasi Saldo Awal

---

LAMPIRAN BERTA ACARA REKONSILIASI DATA DAN  
 SALDIP INTERNAL PERINGKATAN NISBAH BANTU

LAMPIRAN BERTA ACARA  
 REKONSILIASI INTERNAL

3. TAMBA LAMPAK



4. PERINGKAT

74 : 28

5. UNIT ORGANISASI

1. Nama: 000 - 01 - 0000 - 0000000 - 0000 - 00

2. Nama: REKONSILIASI NISBAH BANTU

6. SALDO AWAL PERIODE YANG LAJU YANG BUKAN SALDO AWAL PERIODE SEBELUM

NO	REKONSILIASI KEMBALA	RMB		REKONSILIASI	
		00	00	00	00
1	PERINGKAT NISBAH BANTU	16,271,401.74	16,271,401.74	16,271,401.74	16,271,401.74
2	AMBI LAMPAK	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
3	Perubahan	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
4	ADITI TERHADAP	16,282,401.74	16,282,401.74	16,282,401.74	16,282,401.74
5	Utang	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
6	Perubahan ke Mula	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
7	Salah satu daripada	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8	Utang kepada ahli lembaga	0	0	0	0
9	Utang Tamb. Lembaga	0	0	0	0
10	Perubahan Utang Lembaga	0	0	0	0
11	Utang Perseorangan Pihak Ketiga	0	0	0	0
12	ADITI LAMPIK	0	0	0	0
13	Perubahan Utang Pihak Ketiga	0	0	0	0
14	Utang Perseorangan	0	0	0	0
15	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
16	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
17	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
18	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
19	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
20	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
21	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
22	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
23	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
24	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
25	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
26	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
27	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
28	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
29	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
30	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
31	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
32	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
33	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
34	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
35	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
36	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
37	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
38	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
39	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
40	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
41	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
42	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
43	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
44	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
45	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
46	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
47	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
48	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
49	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
50	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
51	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
52	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
53	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
54	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
55	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
56	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
57	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
58	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
59	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
60	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
61	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
62	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
63	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
64	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
65	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
66	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
67	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
68	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
69	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
70	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
71	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
72	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
73	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
74	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
75	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
76	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
77	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
78	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
79	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
80	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
81	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
82	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
83	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
84	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
85	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
86	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
87	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
88	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
89	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
90	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
91	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
92	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
93	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
94	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
95	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
96	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
97	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
98	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
99	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
100	Utang Pihak Perseorangan	0	0	0	0
TOTAL (110)		16,282,401.74	16,282,401.74	16,282,401.74	16,282,401.74

**V. DATA KENDERAAN SALDO AWAL TAHUN 2008**

NO	NOMOR KENDERAAN	TANPA KENDERAAN	KENDERAAN		SALDO AWAL TAHUN 2008
			UMPM	PLN	
1	2	3	4	5	6
1	POLISI DAERAH	1	0	0	1
2	SIKUT	0	0	0	0
3	Pemilihan	0	0	0	0
4	SIKUT	0	0	0	0
5	SIKUT	0	0	0	0
6	Pemilihan	0	0	0	0
7	Pemilihan	0	0	0	0
8	Pemilihan	0	0	0	0
9	Pemilihan	0	0	0	0
10	Pemilihan	0	0	0	0
11	Pemilihan	0	0	0	0
12	Pemilihan	0	0	0	0
13	Pemilihan	0	0	0	0
14	Pemilihan	0	0	0	0
15	Pemilihan	0	0	0	0
16	Pemilihan	0	0	0	0
17	Pemilihan	0	0	0	0
18	Pemilihan	0	0	0	0
19	Pemilihan	0	0	0	0
20	Pemilihan	0	0	0	0
21	Pemilihan	0	0	0	0
22	Pemilihan	0	0	0	0
23	Pemilihan	0	0	0	0
24	Pemilihan	0	0	0	0
25	Pemilihan	0	0	0	0
26	Pemilihan	0	0	0	0
27	Pemilihan	0	0	0	0
28	Pemilihan	0	0	0	0
29	Pemilihan	0	0	0	0
30	Pemilihan	0	0	0	0
31	Pemilihan	0	0	0	0
32	Pemilihan	0	0	0	0
33	Pemilihan	0	0	0	0
34	Pemilihan	0	0	0	0
35	Pemilihan	0	0	0	0
36	Pemilihan	0	0	0	0
37	Pemilihan	0	0	0	0
38	Pemilihan	0	0	0	0
39	Pemilihan	0	0	0	0
40	Pemilihan	0	0	0	0
41	Pemilihan	0	0	0	0
42	Pemilihan	0	0	0	0
43	Pemilihan	0	0	0	0
44	Pemilihan	0	0	0	0
45	Pemilihan	0	0	0	0
46	Pemilihan	0	0	0	0
47	Pemilihan	0	0	0	0
48	Pemilihan	0	0	0	0
49	Pemilihan	0	0	0	0
50	Pemilihan	0	0	0	0
51	Pemilihan	0	0	0	0
52	Pemilihan	0	0	0	0
53	Pemilihan	0	0	0	0
54	Pemilihan	0	0	0	0
55	Pemilihan	0	0	0	0
56	Pemilihan	0	0	0	0
57	Pemilihan	0	0	0	0
58	Pemilihan	0	0	0	0
59	Pemilihan	0	0	0	0
60	Pemilihan	0	0	0	0
61	Pemilihan	0	0	0	0
62	Pemilihan	0	0	0	0
63	Pemilihan	0	0	0	0
64	Pemilihan	0	0	0	0
65	Pemilihan	0	0	0	0
66	Pemilihan	0	0	0	0
67	Pemilihan	0	0	0	0
68	Pemilihan	0	0	0	0
69	Pemilihan	0	0	0	0
70	Pemilihan	0	0	0	0
71	Pemilihan	0	0	0	0
72	Pemilihan	0	0	0	0
73	Pemilihan	0	0	0	0
74	Pemilihan	0	0	0	0
75	Pemilihan	0	0	0	0
76	Pemilihan	0	0	0	0
77	Pemilihan	0	0	0	0
78	Pemilihan	0	0	0	0
79	Pemilihan	0	0	0	0
80	Pemilihan	0	0	0	0
81	Pemilihan	0	0	0	0
82	Pemilihan	0	0	0	0
83	Pemilihan	0	0	0	0
84	Pemilihan	0	0	0	0
85	Pemilihan	0	0	0	0
86	Pemilihan	0	0	0	0
87	Pemilihan	0	0	0	0
88	Pemilihan	0	0	0	0
89	Pemilihan	0	0	0	0
90	Pemilihan	0	0	0	0
91	Pemilihan	0	0	0	0
92	Pemilihan	0	0	0	0
93	Pemilihan	0	0	0	0
94	Pemilihan	0	0	0	0
95	Pemilihan	0	0	0	0
96	Pemilihan	0	0	0	0
97	Pemilihan	0	0	0	0
98	Pemilihan	0	0	0	0
99	Pemilihan	0	0	0	0
100	Pemilihan	0	0	0	0
TOTAL					0

**VI. NEGLIASI BELAKANG PERSEKUTUAN 2008**

NO	NOMOR KENDERAAN	MILIK SENDIRI	MILIK PERSEKUTUAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1	POLISI DAERAH	1	0	1
2	SIKUT	0	0	0
3	Pemilihan	0	0	0
4	SIKUT	0	0	0
5	SIKUT	0	0	0
6	Pemilihan	0	0	0
7	Pemilihan	0	0	0
8	Pemilihan	0	0	0
9	Pemilihan	0	0	0
10	Pemilihan	0	0	0
11	Pemilihan	0	0	0
12	Pemilihan	0	0	0
13	Pemilihan	0	0	0
14	Pemilihan	0	0	0
15	Pemilihan	0	0	0
16	Pemilihan	0	0	0
17	Pemilihan	0	0	0
18	Pemilihan	0	0	0
19	Pemilihan	0	0	0
20	Pemilihan	0	0	0
21	Pemilihan	0	0	0
22	Pemilihan	0	0	0
23	Pemilihan	0	0	0
24	Pemilihan	0	0	0
25	Pemilihan	0	0	0
26	Pemilihan	0	0	0
27	Pemilihan	0	0	0
28	Pemilihan	0	0	0
29	Pemilihan	0	0	0
30	Pemilihan	0	0	0
31	Pemilihan	0	0	0
32	Pemilihan	0	0	0
33	Pemilihan	0	0	0
34	Pemilihan	0	0	0
35	Pemilihan	0	0	0
36	Pemilihan	0	0	0
37	Pemilihan	0	0	0
38	Pemilihan	0	0	0
39	Pemilihan	0	0	0
40	Pemilihan	0	0	0
41	Pemilihan	0	0	0
42	Pemilihan	0	0	0
43	Pemilihan	0	0	0
44	Pemilihan	0	0	0
45	Pemilihan	0	0	0
46	Pemilihan	0	0	0
47	Pemilihan	0	0	0
48	Pemilihan	0	0	0
49	Pemilihan	0	0	0
50	Pemilihan	0	0	0
51	Pemilihan	0	0	0
52	Pemilihan	0	0	0
53	Pemilihan	0	0	0
54	Pemilihan	0	0	0
55	Pemilihan	0	0	0
56	Pemilihan	0	0	0
57	Pemilihan	0	0	0
58	Pemilihan	0	0	0
59	Pemilihan	0	0	0
60	Pemilihan	0	0	0
61	Pemilihan	0	0	0
62	Pemilihan	0	0	0
63	Pemilihan	0	0	0
64	Pemilihan	0	0	0
65	Pemilihan	0	0	0
66	Pemilihan	0	0	0
67	Pemilihan	0	0	0
68	Pemilihan	0	0	0
69	Pemilihan	0	0	0
70	Pemilihan	0	0	0
71	Pemilihan	0	0	0
72	Pemilihan	0	0	0
73	Pemilihan	0	0	0
74	Pemilihan	0	0	0
75	Pemilihan	0	0	0
76	Pemilihan	0	0	0
77	Pemilihan	0	0	0
78	Pemilihan	0	0	0
79	Pemilihan	0	0	0
80	Pemilihan	0	0	0
81	Pemilihan	0	0	0
82	Pemilihan	0	0	0
83	Pemilihan	0	0	0
84	Pemilihan	0	0	0
85	Pemilihan	0	0	0
86	Pemilihan	0	0	0
87	Pemilihan	0	0	0
88	Pemilihan	0	0	0
89	Pemilihan	0	0	0
90	Pemilihan	0	0	0
91	Pemilihan	0	0	0
92	Pemilihan	0	0	0
93	Pemilihan	0	0	0
94	Pemilihan	0	0	0
95	Pemilihan	0	0	0
96	Pemilihan	0	0	0
97	Pemilihan	0	0	0
98	Pemilihan	0	0	0
99	Pemilihan	0	0	0
100	Pemilihan	0	0	0
TOTAL				0

**84. DATA TRANSAKSI BUKU NERACANAN**

**a. MUTASI TABUNG BBN**

NO	PERUSAHAAN BERAKA	JENIS TRANSAKSI	KLASIFIKASI	NILAI
01	01	01	01	01
1	Bank	Transfer Masuk		0
		Bank Masuk		0
		01		0
2	Transfer dan Saldo	Transfer Masuk		0
		Bank Masuk		0
		01		0
3	01	01		0
	TOTAL			0

**b. MUTASI LOKASI BBN**

NO	PERUSAHAAN BERAKA	JENIS TRANSAKSI	KLASIFIKASI	NILAI
01	01	01	01	01
1	Bank	Transfer Masuk		0
		Bank Masuk		0
		01		0
2	Transfer dan Saldo	Transfer Masuk		0
		Bank Masuk		0
		01		0
3	01	01		0
	TOTAL			0

**c. PERUBAHAN BBN**

NO	PERUSAHAAN BERAKA	JENIS PERUBAHAN	NILAI
01	01	01	01
1	Transfer dan Saldo	Perubahan Rangkap	-
2	Saluran, dan Saluran	Perubahan Rangkap	-
3	Saluran dan Saluran	Perubahan Rangkap	-
4	Saluran	Perubahan Rangkap	-
5	Saluran dan Saluran	Perubahan Rangkap	-
	TOTAL		

**85. YEMERBAAN NEGARA BUKU PAJAK (BNP) PENGELOLAAN BBN**

Surat Perintah Negara Buku Pajak (SPNP) yang berasal dari pengalihan BBN pada periode Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 16.701.000,- (Enadua belas milyar enam puluh satu ribu. Tujuh puluh satu rupiah).

**86. PENGURANGAN LAYANAN**

Saldo awal adalah Tahunan Tahun Anggaran 2007 dan termasuk dalam antara perisipen (dan BBN) sebesar 1.007 dan 1.000.



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Laporan Posisi BMN di Neraca - Saldo Awal

Posisi per tanggal 01 Januari Tahun  
Anggaran 2025

**LAPORAN POS B BERANGKAS BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POS B PER TAHUNAN 01 JANUARI 2026 (BALDO AWAL)  
TAHUN ANGGARAN 2026**

UANG : 001                      MENTERI AGUNG  
 UANG : 48171                PENGADILAN NEGARA SATELIT

Tanggal : 27-01-24 2:01 PM  
 Halaman : 1

Kode Lap : 00\_000\_0000\_0000\_000

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
11711	Barang Konsumsi	13,555,950
11713	Bahan untuk Pemeliharaan	1,320,200
13111	Tanah	17,638,990,000
13211	Peralatan dan Mesin	3,896,203,700
13311	Gedung dan Bangunan	7,562,706,290
13512	Aset Tetap Lainnya	48,342,000
13711	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,410,998,250)
13721	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4,821,688,250)
<b>JUMLAH</b>		<b>21,828,050,000</b>



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Laporan Posisi BMN di Neraca

Posisi per tanggal 31 Desember Tahun 2025

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023  
TAHUN ANGGARAN 2023**

UANG : RMB      BUKLAWAH ADUNG  
 UANG : RMB19      PENGADLAN KESER BARTUA

Tgl Data : 27/01/2024 09:40 AM  
 Tgl Cetak : 27/01/2024 09:40 AM  
 Halaman : 1  
 File Cetak : lap\_posn\_neraca\_posn\_posn\_posn\_posn

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	11.359.475
117112	Bahan untuk Pemeliharaan	969.300
131111	Tanah	17.633.690.000
132111	Peralatan dan Mesin	3.993.743.709
133111	Gedung dan Bangunan	7.262.708.290
136121	Aset Tetap Lainnya	43.342.063
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.590.579.113)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.104.538.185)
<b>J U M L A H</b>		<b>19.871.499.134</b>

Bertek, 27 Januari 2024

Pengadlan Keser UANG  
 Kepala Pengadlan Barang



PENGADLAN KESER, S. Aji,  
 Kepala Pengadlan Barang



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Laporan Barang Persediaan

Per 31 Desember 2025

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

UNIT : 001                      MENTERI AGUNG  
SARUNG : 00103                PENGADILAN NEGARA SAMPAL

Tgl Data : 27/01/20 0 38 AM  
Tanggal : 27/01/20 0 38 AM  
Halaman : 1  
KIDG-LAP : 160\_0101\_0000\_00001\_0001

Kode	Uraian	Jumlah
00101	<b>Barang Konsumsi</b>	
00101001	Ase Tolu	213,000
00101002	Tres Tolu Tres Dempul	11,000
00101003	Pengapal Panas	30,000
00101004	Pengapal/Kromer	40,000
00101005	Batu Tolu	2000,000
00101006	Obeng Dan Waj	3300,000
00101007	Penggerak	2,000
00101008	Cadangan Tolu Kantor	10,000
00101009	Ase Plastik	20,000
00101010	Seplast	101,000
00101011	Ac/Sepatu	100,000
00101012	Ase Tolu Kantor Lainnya	10,000
00101013	Kertas HVS	2007,000
00101014	Bekas/Bekas	107,000
00101015	Amplas	200,000
00101016	Kardus Dan Cover Lainnya	300,000
00101017	Batu Gamping	12,000
00101018	Ase Perundang/Regulasi/Kantor Lainnya	100,000
00101019	Membakar Untuk Regulasi Kantor Lainnya	10,000
<b>Jumlah Barang Konsumsi</b>		<b>11,000,470</b>
00102	<b>Bahan untuk Pemeliharaan</b>	
00102001	Capuk Dan Sikat	100,000
00102002	Mesin Dan Dan Lap	100,000
00102003	Timpa, Seng, Dan Tempa/Kr Lainnya	200,000
00102004	Kawat Dan Tempa Seng	100,000
00102005	Bahan Untuk Jukuk Perawatan	100,000
00102006	Pengharan Ruang	0,000
<b>Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan</b>		<b>600,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12,500,470</b>

Keterangan:

1. Persediaan senilai Rp.                      0 dalam kondisi rusak.  
2. Persediaan senilai Rp.                      0 dalam kondisi usang.



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Laporan Barang Intrakomptabel

—  
Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025

**UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR**  
**BUREAU OF LAND MANAGEMENT**  
**WATER RESOURCES DIVISION**  
**WATER RESOURCES MANAGEMENT SECTION**

DATE: 10/15/2010  
 BY: [Signature]  
 TITLE: [Signature]

BY: [Signature]  
 DATE: 10/15/2010  
 TITLE: [Signature]

WATER RESOURCES MANAGEMENT SECTION		WATER RESOURCES MANAGEMENT SECTION		WATER RESOURCES MANAGEMENT SECTION		WATER RESOURCES MANAGEMENT SECTION	
NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
1	...	1	...	1	...	1	...
2	...	2	...	2	...	2	...
3	...	3	...	3	...	3	...
4	...	4	...	4	...	4	...
5	...	5	...	5	...	5	...
6	...	6	...	6	...	6	...
7	...	7	...	7	...	7	...
8	...	8	...	8	...	8	...
9	...	9	...	9	...	9	...
10	...	10	...	10	...	10	...
11	...	11	...	11	...	11	...
12	...	12	...	12	...	12	...
13	...	13	...	13	...	13	...
14	...	14	...	14	...	14	...
15	...	15	...	15	...	15	...
16	...	16	...	16	...	16	...
17	...	17	...	17	...	17	...
18	...	18	...	18	...	18	...
19	...	19	...	19	...	19	...
20	...	20	...	20	...	20	...
21	...	21	...	21	...	21	...
22	...	22	...	22	...	22	...
23	...	23	...	23	...	23	...
24	...	24	...	24	...	24	...
25	...	25	...	25	...	25	...
26	...	26	...	26	...	26	...
27	...	27	...	27	...	27	...
28	...	28	...	28	...	28	...
29	...	29	...	29	...	29	...
30	...	30	...	30	...	30	...
31	...	31	...	31	...	31	...
32	...	32	...	32	...	32	...
33	...	33	...	33	...	33	...
34	...	34	...	34	...	34	...
35	...	35	...	35	...	35	...
36	...	36	...	36	...	36	...
37	...	37	...	37	...	37	...
38	...	38	...	38	...	38	...
39	...	39	...	39	...	39	...
40	...	40	...	40	...	40	...
41	...	41	...	41	...	41	...
42	...	42	...	42	...	42	...
43	...	43	...	43	...	43	...
44	...	44	...	44	...	44	...
45	...	45	...	45	...	45	...
46	...	46	...	46	...	46	...
47	...	47	...	47	...	47	...
48	...	48	...	48	...	48	...
49	...	49	...	49	...	49	...
50	...	50	...	50	...	50	...



**LEPOMBO BUDAYA PERSIDANGAN  
DITRUSMIKEMPTAN  
TANJUNGPEDAGANG KOTA KUALA LUMPUR (KUALA)  
LAPORAN BUKU KUALA KUALA KUALA 21 FEBRUARI 2022**

TAHUN: 2021  
 BUKU: 2021  
 BUKU: 2021

TAHUN: 2021  
 BUKU: 2021  
 BUKU: 2021  
 BUKU: 2021

NO	NAMA	JENIS	KUALA KUALA		KUALA KUALA		KUALA KUALA		KUALA KUALA	
			NO	NO	NO	NO	NO	NO		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										


  
 TANDatangan dan cap rasmi  
 Menteri Pendidikan  
 Malaysia  
 Kementerian Pendidikan  
 Malaysia



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Laporan Barang Ekstrakomptabel

Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025

**REKAM JEJAK PELAJARAN**  
**REKORSDOKUMEN**  
**REKAM JEJAK DAN RENCANA PELAKSANAAN**  
**REKAM JEJAK PELAJARAN & RENCANA PELAKSANAAN**

NO. :  
 NAMA :  
 NIM :  
 NPM :

NO. :  
 NAMA :  
 NIM :  
 NPM :

No	Materi	Kategori	Kategori		Kategori		Kategori	
			1	2	3	4	5	6
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								


  
 Kepala Sekolah  
 NIP. 19600101196001011  
 NPM. 19600101196001011  
 NPM. 19600101196001011



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Laporan Barang Gabungan

Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025



**LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN**  
**BERBENTUK LEMBAR KERJA (KAWAHLAARBEIDSBLOK)**  
**BERURUTAN (DIAJUKAN SAMA-SAMA)**  
**UNTUK MENYUSUN TUGAS BERGAMBAR DI DALAM RUMAH SAKIT**

**NAMA :** \_\_\_\_\_  
**NO :** \_\_\_\_\_  
**KELOMPOK / KAWAHLAARBEIDSBLOK :** \_\_\_\_\_

**Tgl. Pengisian :** \_\_\_\_\_  
**Tgl. Pengisian :** \_\_\_\_\_  
**Halaman :** \_\_\_\_\_  
**Tahun :** \_\_\_\_\_

KAWAHLAARBEIDSBLOK		No.	KAWAHLAARBEIDSBLOK		MATERI				KAWAHLAARBEIDSBLOK	
No.	MATERI		No.	MATERI	No.	MATERI	No.	MATERI	No.	MATERI
1		1		1						
2		2		2						
3		3		3						
4		4		4						
5		5		5						
6		6		6						
7		7		7						
8		8		8						
9		9		9						
10		10		10						
11		11		11						
12		12		12						
13		13		13						
14		14		14						
15		15		15						
16		16		16						
17		17		17						
18		18		18						
19		19		19						
20		20		20						
21		21		21						
22		22		22						
23		23		23						
24		24		24						
25		25		25						
26		26		26						
27		27		27						
28		28		28						
29		29		29						
30		30		30						
31		31		31						
32		32		32						
33		33		33						
34		34		34						
35		35		35						
36		36		36						
37		37		37						
38		38		38						
39		39		39						
40		40		40						
41		41		41						
42		42		42						
43		43		43						
44		44		44						
45		45		45						
46		46		46						
47		47		47						
48		48		48						
49		49		49						
50		50		50						

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**RESEARCH REPORT**  
**RESEARCH REPORT**  
**RESEARCH REPORT**

**NO.**                      **REVISI**                      **REVISI**  
**001**                      **001**                      **001**

**NO. SKRIPSI**                      **001**  
**NO. JILID**                      **1**  
**NO. HALAMAN**                      **100**

NO.	JUDUL	JENIS PENELITIAN	HASIL PENELITIAN		SIMPULAN		REKOMENDASI	
			TEMA	ISI	TEMA	ISI	REKOMENDASI	ISI
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Jumlah</b>								

  
 ...  
 ...  
 ...



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP SEMESTER II 2025

# Laporan Penyusutan Intrakomptabel

—  
Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025





**LAPORAN KEMERDIAAN BERKAS BUKU PENGESAHAN  
KEMERDIAAN BERKAS BUKU PENGESAHAN  
KEMERDIAAN BERKAS BUKU PENGESAHAN  
KEMERDIAAN BERKAS BUKU PENGESAHAN**

**NO.:** 001  
**TAHUN:** 2020

**NO.:** 001  
**TAHUN:** 2020  
**NO.:** 001  
**TAHUN:** 2020

No.	Nama	Jenis	Kategori				Total
			1	2	3	4	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

  
 Kepala Kantor  
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
 Republik Indonesia  
 Jakarta



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel

—  
Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PADJARAN  
REKAPITULASI DATA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DARI PERIODE 1 JANUARI 2014 - 31 DESEMBER 2014**

LOKASI : ...  
 WAKTU : ...  
 NAMA : ...

NO. ...  
 ...  
 ...

Kategori			Detail				
No	Nama	...	...	...	...	...	...
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...


  
 ...  
 ...  
 ...



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Laporan CRBMN

---

Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025













4. **STATEMENT OF WORK (SOW)**  
 5. **FOR THE 100th AVIATION BRIGADE**  
 6. **FOR THE 100th AVIATION BRIGADE**  
 7. **FOR THE 100th AVIATION BRIGADE**

8. **Version:** 1.0  
 9. **Date:** 10/10/2010  
 10. **Page:** 10 of 10

11. **Contract Number:** W56126-09-2-0000  
 12. **Task Order Number:** 0001

13. <b>ITEMS TO BE PROVIDED</b>		14. <b>UNIT</b>	15. <b>PERIODIC PAYMENTS &amp; DELIVERABLES</b>		16. <b>PERIODIC PAYMENTS</b>		17. <b>DELIVERABLES</b>	
18. <b>ITEM</b>	19. <b>DESCRIPTION</b>		20. <b>START DATE</b>	21. <b>END DATE</b>	22. <b>START DATE</b>	23. <b>END DATE</b>	24. <b>START DATE</b>	25. <b>END DATE</b>
26. 1	27. [Item Description]	28. [Unit]	29. [Start Date]	30. [End Date]	31. [Start Date]	32. [End Date]	33. [Start Date]	34. [End Date]
35. 2	36. [Item Description]	37. [Unit]	38. [Start Date]	39. [End Date]	40. [Start Date]	41. [End Date]	42. [Start Date]	43. [End Date]
44. 3	45. [Item Description]	46. [Unit]	47. [Start Date]	48. [End Date]	49. [Start Date]	50. [End Date]	51. [Start Date]	52. [End Date]
53. 4	54. [Item Description]	55. [Unit]	56. [Start Date]	57. [End Date]	58. [Start Date]	59. [End Date]	60. [Start Date]	61. [End Date]
62. 5	63. [Item Description]	64. [Unit]	65. [Start Date]	66. [End Date]	67. [Start Date]	68. [End Date]	69. [Start Date]	70. [End Date]
71. 6	72. [Item Description]	73. [Unit]	74. [Start Date]	75. [End Date]	76. [Start Date]	77. [End Date]	78. [Start Date]	79. [End Date]
80. 7	81. [Item Description]	82. [Unit]	83. [Start Date]	84. [End Date]	85. [Start Date]	86. [End Date]	87. [Start Date]	88. [End Date]
89. 8	90. [Item Description]	91. [Unit]	92. [Start Date]	93. [End Date]	94. [Start Date]	95. [End Date]	96. [Start Date]	97. [End Date]
98. 9	99. [Item Description]	100. [Unit]	101. [Start Date]	102. [End Date]	103. [Start Date]	104. [End Date]	105. [Start Date]	106. [End Date]
107. 10	108. [Item Description]	109. [Unit]	110. [Start Date]	111. [End Date]	112. [Start Date]	113. [End Date]	114. [Start Date]	115. [End Date]
116. 11	117. [Item Description]	118. [Unit]	119. [Start Date]	120. [End Date]	121. [Start Date]	122. [End Date]	123. [Start Date]	124. [End Date]
125. 12	126. [Item Description]	127. [Unit]	128. [Start Date]	129. [End Date]	130. [Start Date]	131. [End Date]	132. [Start Date]	133. [End Date]
134. 13	135. [Item Description]	136. [Unit]	137. [Start Date]	138. [End Date]	139. [Start Date]	140. [End Date]	141. [Start Date]	142. [End Date]
143. 14	144. [Item Description]	145. [Unit]	146. [Start Date]	147. [End Date]	148. [Start Date]	149. [End Date]	150. [Start Date]	151. [End Date]
152. 15	153. [Item Description]	154. [Unit]	155. [Start Date]	156. [End Date]	157. [Start Date]	158. [End Date]	159. [Start Date]	160. [End Date]
159. 16	160. [Item Description]	161. [Unit]	162. [Start Date]	163. [End Date]	164. [Start Date]	165. [End Date]	166. [Start Date]	167. [End Date]
168. 17	169. [Item Description]	170. [Unit]	171. [Start Date]	172. [End Date]	173. [Start Date]	174. [End Date]	175. [Start Date]	176. [End Date]
177. 18	178. [Item Description]	179. [Unit]	180. [Start Date]	181. [End Date]	182. [Start Date]	183. [End Date]	184. [Start Date]	185. [End Date]
186. 19	187. [Item Description]	188. [Unit]	189. [Start Date]	190. [End Date]	191. [Start Date]	192. [End Date]	193. [Start Date]	194. [End Date]
195. 20	196. [Item Description]	197. [Unit]	198. [Start Date]	199. [End Date]	200. [Start Date]	201. [End Date]	202. [Start Date]	203. [End Date]
204. 21	205. [Item Description]	206. [Unit]	207. [Start Date]	208. [End Date]	209. [Start Date]	210. [End Date]	211. [Start Date]	212. [End Date]
211. 22	212. [Item Description]	213. [Unit]	214. [Start Date]	215. [End Date]	216. [Start Date]	217. [End Date]	218. [Start Date]	219. [End Date]
220. 23	221. [Item Description]	222. [Unit]	223. [Start Date]	224. [End Date]	225. [Start Date]	226. [End Date]	227. [Start Date]	228. [End Date]
229. 24	230. [Item Description]	231. [Unit]	232. [Start Date]	233. [End Date]	234. [Start Date]	235. [End Date]	236. [Start Date]	237. [End Date]
238. 25	239. [Item Description]	240. [Unit]	241. [Start Date]	242. [End Date]	243. [Start Date]	244. [End Date]	245. [Start Date]	246. [End Date]
247. 26	248. [Item Description]	249. [Unit]	250. [Start Date]	251. [End Date]	252. [Start Date]	253. [End Date]	254. [Start Date]	255. [End Date]
256. 27	257. [Item Description]	258. [Unit]	259. [Start Date]	260. [End Date]	261. [Start Date]	262. [End Date]	263. [Start Date]	264. [End Date]
265. 28	266. [Item Description]	267. [Unit]	268. [Start Date]	269. [End Date]	270. [Start Date]	271. [End Date]	272. [Start Date]	273. [End Date]
274. 29	275. [Item Description]	276. [Unit]	277. [Start Date]	278. [End Date]	279. [Start Date]	280. [End Date]	281. [Start Date]	282. [End Date]
283. 30	284. [Item Description]	285. [Unit]	286. [Start Date]	287. [End Date]	288. [Start Date]	289. [End Date]	290. [Start Date]	291. [End Date]
292. 31	293. [Item Description]	294. [Unit]	295. [Start Date]	296. [End Date]	297. [Start Date]	298. [End Date]	299. [Start Date]	300. [End Date]
301. 32	302. [Item Description]	303. [Unit]	304. [Start Date]	305. [End Date]	306. [Start Date]	307. [End Date]	308. [Start Date]	309. [End Date]
310. 33	311. [Item Description]	312. [Unit]	313. [Start Date]	314. [End Date]	315. [Start Date]	316. [End Date]	317. [Start Date]	318. [End Date]
319. 34	320. [Item Description]	321. [Unit]	322. [Start Date]	323. [End Date]	324. [Start Date]	325. [End Date]	326. [Start Date]	327. [End Date]
328. 35	329. [Item Description]	330. [Unit]	331. [Start Date]	332. [End Date]	333. [Start Date]	334. [End Date]	335. [Start Date]	336. [End Date]
335. 36	336. [Item Description]	337. [Unit]	338. [Start Date]	339. [End Date]	340. [Start Date]	341. [End Date]	342. [Start Date]	343. [End Date]
344. 37	345. [Item Description]	346. [Unit]	347. [Start Date]	348. [End Date]	349. [Start Date]	350. [End Date]	351. [Start Date]	352. [End Date]
351. 38	352. [Item Description]	353. [Unit]	354. [Start Date]	355. [End Date]	356. [Start Date]	357. [End Date]	358. [Start Date]	359. [End Date]
360. 39	361. [Item Description]	362. [Unit]	363. [Start Date]	364. [End Date]	365. [Start Date]	366. [End Date]	367. [Start Date]	368. [End Date]
369. 40	370. [Item Description]	371. [Unit]	372. [Start Date]	373. [End Date]	374. [Start Date]	375. [End Date]	376. [Start Date]	377. [End Date]
378. 41	379. [Item Description]	380. [Unit]	381. [Start Date]	382. [End Date]	383. [Start Date]	384. [End Date]	385. [Start Date]	386. [End Date]
387. 42	388. [Item Description]	389. [Unit]	390. [Start Date]	391. [End Date]	392. [Start Date]	393. [End Date]	394. [Start Date]	395. [End Date]
396. 43	397. [Item Description]	398. [Unit]	399. [Start Date]	400. [End Date]	401. [Start Date]	402. [End Date]	403. [Start Date]	404. [End Date]
403. 44	404. [Item Description]	405. [Unit]	406. [Start Date]	407. [End Date]	408. [Start Date]	409. [End Date]	410. [Start Date]	411. [End Date]
412. 45	413. [Item Description]	414. [Unit]	415. [Start Date]	416. [End Date]	417. [Start Date]	418. [End Date]	419. [Start Date]	420. [End Date]
419. 46	420. [Item Description]	421. [Unit]	422. [Start Date]	423. [End Date]	424. [Start Date]	425. [End Date]	426. [Start Date]	427. [End Date]
428. 47	429. [Item Description]	430. [Unit]	431. [Start Date]	432. [End Date]	433. [Start Date]	434. [End Date]	435. [Start Date]	436. [End Date]
435. 48	436. [Item Description]	437. [Unit]	438. [Start Date]	439. [End Date]	440. [Start Date]	441. [End Date]	442. [Start Date]	443. [End Date]
441. 49	442. [Item Description]	443. [Unit]	444. [Start Date]	445. [End Date]	446. [Start Date]	447. [End Date]	448. [Start Date]	449. [End Date]
449. 50	450. [Item Description]	451. [Unit]	452. [Start Date]	453. [End Date]	454. [Start Date]	455. [End Date]	456. [Start Date]	457. [End Date]
455. 51	456. [Item Description]	457. [Unit]	458. [Start Date]	459. [End Date]	460. [Start Date]	461. [End Date]	462. [Start Date]	463. [End Date]
461. 52	462. [Item Description]	463. [Unit]	464. [Start Date]	465. [End Date]	466. [Start Date]	467. [End Date]	468. [Start Date]	469. [End Date]
469. 53	470. [Item Description]	471. [Unit]	472. [Start Date]	473. [End Date]	474. [Start Date]	475. [End Date]	476. [Start Date]	477. [End Date]
475. 54	476. [Item Description]	477. [Unit]	478. [Start Date]	479. [End Date]	480. [Start Date]	481. [End Date]	482. [Start Date]	483. [End Date]
481. 55	482. [Item Description]	483. [Unit]	484. [Start Date]	485. [End Date]	486. [Start Date]	487. [End Date]	488. [Start Date]	489. [End Date]
489. 56	490. [Item Description]	491. [Unit]	492. [Start Date]	493. [End Date]	494. [Start Date]	495. [End Date]	496. [Start Date]	497. [End Date]
495. 57	496. [Item Description]	497. [Unit]	498. [Start Date]	499. [End Date]	500. [Start Date]	501. [End Date]	502. [Start Date]	503. [End Date]
501. 58	502. [Item Description]	503. [Unit]	504. [Start Date]	505. [End Date]	506. [Start Date]	507. [End Date]	508. [Start Date]	509. [End Date]
509. 59	510. [Item Description]	511. [Unit]	512. [Start Date]	513. [End Date]	514. [Start Date]	515. [End Date]	516. [Start Date]	517. [End Date]
517. 60	518. [Item Description]	519. [Unit]	520. [Start Date]	521. [End Date]	522. [Start Date]	523. [End Date]	524. [Start Date]	525. [End Date]
525. 61	526. [Item Description]	527. [Unit]	528. [Start Date]	529. [End Date]	530. [Start Date]	531. [End Date]	532. [Start Date]	533. [End Date]
533. 62	534. [Item Description]	535. [Unit]	536. [Start Date]	537. [End Date]	538. [Start Date]	539. [End Date]	540. [Start Date]	541. [End Date]
541. 63	542. [Item Description]	543. [Unit]	544. [Start Date]	545. [End Date]	546. [Start Date]	547. [End Date]	548. [Start Date]	549. [End Date]
549. 64	550. [Item Description]	551. [Unit]	552. [Start Date]	553. [End Date]	554. [Start Date]	555. [End Date]	556. [Start Date]	557. [End Date]
557. 65	558. [Item Description]	559. [Unit]	560. [Start Date]	561. [End Date]	562. [Start Date]	563. [End Date]	564. [Start Date]	565. [End Date]
565. 66	566. [Item Description]	567. [Unit]	568. [Start Date]	569. [End Date]	570. [Start Date]	571. [End Date]	572. [Start Date]	573. [End Date]
573. 67	574. [Item Description]	575. [Unit]	576. [Start Date]	577. [End Date]	578. [Start Date]	579. [End Date]	580. [Start Date]	581. [End Date]
581. 68	582. [Item Description]	583. [Unit]	584. [Start Date]	585. [End Date]	586. [Start Date]	587. [End Date]	588. [Start Date]	589. [End Date]
589. 69	590. [Item Description]	591. [Unit]	592. [Start Date]	593. [End Date]	594. [Start Date]	595. [End Date]	596. [Start Date]	597. [End Date]
597. 70	598. [Item Description]	599. [Unit]	600. [Start Date]	601. [End Date]	602. [Start Date]	603. [End Date]	604. [Start Date]	605. [End Date]
605. 71	606. [Item Description]	607. [Unit]	608. [Start Date]	609. [End Date]	610. [Start Date]	611. [End Date]	612. [Start Date]	613. [End Date]
613. 72	614. [Item Description]	615. [Unit]	616. [Start Date]	617. [End Date]	618. [Start Date]	619. [End Date]	620. [Start Date]	621. [End Date]
621. 73	622. [Item Description]	623. [Unit]	624. [Start Date]	625. [End Date]	626. [Start Date]	627. [End Date]	628. [Start Date]	629. [End Date]
629. 74	630. [Item Description]	631. [Unit]	632. [Start Date]	633. [End Date]	634. [Start Date]	635. [End Date]	636. [Start Date]	637. [End Date]
637. 75	638. [Item Description]	639. [Unit]	640. [Start Date]	641. [End Date]	642. [Start Date]	643. [End Date]	644. [Start Date]	645. [End Date]
645. 76	646. [Item Description]	647. [Unit]	648. [Start Date]	649. [End Date]	650. [Start Date]	651. [End Date]	652. [Start Date]	653. [End Date]
653. 77	654. [Item Description]	655. [Unit]	656. [Start Date]	657. [End Date]	658. [Start Date]	659. [End Date]	660. [Start Date]	661. [End Date]
661. 78	662. [Item Description]	663. [Unit]	664. [Start Date]	665. [End Date]	666. [Start Date]	667. [End Date]	668. [Start Date]	669. [End Date]
669. 79	670. [Item Description]	671. [Unit]	672. [Start Date]	673. [End Date]	674. [Start Date]	675. [End Date]	676. [Start Date]	677. [End Date]
677. 80	678. [Item Description]	679. [Unit]	680. [Start Date]	681. [End Date]	682. [Start Date]	683. [End Date]	684. [Start Date]	685. [End Date]
685. 81	686. [Item Description]	687. [Unit]	688. [Start Date]	689. [End Date]	690. [Start Date]	691. [End Date]	692. [Start Date]	693. [End Date]
693. 82	694. [Item Description]	695. [Unit]	696. [Start Date]	697. [End Date]	698. [Start Date]	699. [End Date]	700. [Start Date]	701. [End Date]
701. 83	698. [Item Description]	699. [Unit]	700. [Start Date]	701. [End Date]	702. [Start Date]	703. [End Date]	704. [Start Date]	705. [End Date]
705. 84	699. [Item Description]	700. [Unit]	702. [Start Date]	703. [End Date]	704. [Start Date]	705. [End Date]	706. [Start Date]	707. [End Date]
707. 85	700. [Item Description]	701. [Unit]	704. [Start Date]	705. [End Date]	706. [Start Date]	707. [End Date]	708. [Start Date]	709. [End Date]
709. 86	701. [Item Description]	702. [Unit]	706. [Start Date]	707. [End Date]	708. [Start Date]	709. [End Date]	710. [Start Date]	711. [End Date]
711. 87	702. [Item Description]	703. [Unit]	708. [Start Date]	709. [End Date]	710. [Start Date]	711. [End Date]	712. [Start Date]	713. [End Date]
713. 88	703. [Item Description]	704. [Unit]	710. [Start Date]	711. [End Date]	712. [Start Date]	713. [End Date]	714. [Start Date]	715. [End Date]
715. 89	704. [Item Description]	705. [Unit]	712. [Start Date]	713. [End Date]	714. [Start Date]	715. [End Date]	716. [Start Date]	717. [End Date]
717. 90	705. [Item Description]	706. [Unit]	714. [Start Date]	715. [End Date]	716. [Start Date]	717. [End Date]	718. [Start Date]	719. [End Date]
719. 91	706. [Item Description]	707. [Unit]	716. [Start Date]	717. [End Date]	718. [Start Date]	719. [End Date]	720. [Start Date]	721. [End Date]
721. 92	707. [Item Description]	708. [Unit]	718. [Start Date]	719. [End Date]	720. [Start Date]	721. [End Date]	722. [Start Date]	723. [End Date]
723. 93	708. [Item Description]	709. [Unit]	720. [Start Date]	721. [End Date]	722. [Start Date]	723. [End Date]	724. [Start Date]	725. [End Date]
725. 94	709. [Item Description]	710. [Unit]	722. [Start Date]	723. [End Date]	724. [Start Date]	725. [End Date]	726. [Start Date]	727. [End Date]
727. 95	710. [Item Description]	711. [Unit]	724. [Start Date]	725. [End Date]	726. [Start Date]	727. [End Date]	728. [Start Date]	729. [End Date]
729. 96	711. [Item Description]	712. [Unit]	726. [Start Date]					





NATIONAL HEALTH SERVICE  
 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR  
 ENDING 31 MARCH 2006

Part 1: Summary of the financial statements  
 for the year ending 31 March 2006

Page: 1 of 1  
 Date: 11/03/06  
 Time: 10:00:00 AM

Part 1: Summary of the financial statements		for the year ending 31 March 2006		for the year ending 31 March 2005		for the year ending 31 March 2004	
Account	2006	2005	2004	2006	2005	2006	2005
Income	1,000,000	950,000	900,000	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000
Expenditure	(800,000)	(750,000)	(700,000)	(800,000)	(750,000)	(800,000)	(750,000)
Surplus	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000

Signed: \_\_\_\_\_  
 Director General of Health Services  
 Department of Health



STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
 AS AT THE END OF THE YEAR 2018-19  
 (IN INDIAN RUPEES)

Page: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_  
 Signature: \_\_\_\_\_

Name of the Institution: \_\_\_\_\_  
 Name of the Department: \_\_\_\_\_

Particulars		No.	Particulars		Particulars		Particulars	
2018-19	2017-18		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Assets								
Fixed Assets								
Land and Buildings								
Plant and Machinery								
Investments								
Current Assets								
Debtors								
Stocks								
Prepaid Expenses								
Liabilities								
Capital								
Reserves								
Current Liabilities								
Payables								
Other Liabilities								
Total								

Signature of the Officer  
 Name of the Officer  
 Designation of the Officer  
 Date: \_\_\_\_\_



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaBMN)

---



## 1. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbaiki melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Bantul, sebagai salah satu satuan kerja dan Mahkamah Agung yang berperan sebagai Rucas Pengguna BMN, diwajibkan untuk menyusun LBNP secara berkala, baik LBNP Semesteran maupun LBNP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Bantul dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



## A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapansteraan dan Kasekretariat Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Segan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;



- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Ribah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.06/2019 tentang Pengeluaran Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 24) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 25) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modal Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modal Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;



- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modal Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 30) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 31) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2021 tentang Penataharian Kodifikasi Segmen Akun pada Ragan Akun Standar; dan
- 32) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XI/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akural dan Pelaporan Keuangan.



## B. Entitas Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 *jocto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan BMN, setiap instansi pemerintah yang bertradisi sebagai Pengguna BMN diwajibkan untuk menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP). Dalam menyusun LBP, Mahkamah Agung mengikuti jenjang pelaporan struktural yang berlaku mulai dari tingkat Satker (1846 UAKPB), Komisi (137 UAPPB-W), Eselon I (7 UAPPB-EI), hingga Kementerian/Lembaga (1 UAPB).

LKBP Pengadilan Negeri Bantul Tahunan Tahun 2025 menyajikan nilai BMN secara menyeluruh, baik yang termasuk kategori intrakomptabel (memenuhi syarat kapabilitas) maupun ekstrakomptabel berdasarkan penggolongan, kodefikasi, dan akun neraca yang diatur dalam peraturan terkait. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

## C. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini disusun dan disajikan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

## II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) didefinisikan sebagai seluruh barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lain yang sah. BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya, BMN ada yang dikategorikan sebagai aset lancar maupun aset tetap.

Pengkatagorian ini memiliki peran penting dalam menyajikan nilai BMN secara transparan dan akuntabel dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKGL) serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). BMN digolongkan sebagai aset lancar apabila diharapkan akan segera digunakan atau dijual dalam jangka waktu 12 bulan (1 tahun) sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi syarat ini akan diperlakukan sebagai



## Persediaan

Sementara itu, BMN dikategorikan sebagai aset tetap jika memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, tidak ditujukan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun untuk tujuan penggunaan. Aset tetap BMN mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Dengan masa manfaat yang panjang, aset tetap BMN menjadi komponen krusial dalam pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.

BMN yang telah diperoleh harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin melalui pelaporan BMN secara berkala dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pembukuan, inventarisasi, hingga pelaporan yang sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses sistematis ini dikenal sebagai penatausahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.

Penatausahaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dan kebalutruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman tercapai jika informasi



disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN

#### A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBKP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kardex pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Pemberian kode BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010, BMN diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan utama, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Meub. Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Tak Berwujud. Setiap golongan kemudian dibagi lagi menjadi bidang, kelompok,



subkelompok, dan sub-sub kelompok untuk memastikan klasifikasi yang lebih detail dan terstruktur.

Pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (satuan kerja), pelaporan BMN diatur mulai dari golongan barang hingga sub-sub kelompok barang. Sementara itu, pada tingkat wilayah dan/atau Eselon I, pelaporan dilakukan mulai dari golongan hingga sub kelompok barang. Adapun pada tingkat Pengguna Barang (Kementerian/Lembaga), laporan hanya mencakup dari golongan hingga kelompok barang.

Pemahaman mengenai hal ini diawali dengan mengenali fungsi suatu barang, apakah sesuai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi (tupf) organisasi, yang tentu saja berbeda di setiap Kementerian/Lembaga. Masalah yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman bahwa setiap barang harus diklasifikasikan secara rinci berdasarkan golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, hingga sub-sub kelompok.

1 - Persediaan  
2 - Tanah  
3 - Peralatan dan Meubel  
4 - Gedung dan Bangunan  
5 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
6 - Aset Tetap Lainnya  
7 - Konstruksi Dalam Pengerjaan  
8 - Aset Tak Berwujud

**DAFTAR KODE BARANG**

Kode	Barang
3	Meubel
3.01	Meubel
3.01.01	Kursi
3.01.02	Kursi Roda
3.01.03	Kursi Kantor
3.01.04	Kursi Kayu
3.01.05	Kursi Plastik
3.01.06	Kursi Kulit
3.01.07	Kursi Besi
3.01.08	Kursi Aluminium
3.01.09	Kursi Bambu
3.01.10	Kursi Rotan
3.01.11	Kursi Kain
3.01.12	Kursi Kulit
3.01.13	Kursi Besi
3.01.14	Kursi Aluminium
3.01.15	Kursi Bambu
3.01.16	Kursi Rotan
3.01.17	Kursi Kain
3.01.18	Kursi Kulit
3.01.19	Kursi Besi
3.01.20	Kursi Aluminium
3.01.21	Kursi Bambu
3.01.22	Kursi Rotan
3.01.23	Kursi Kain
3.01.24	Kursi Kulit
3.01.25	Kursi Besi
3.01.26	Kursi Aluminium
3.01.27	Kursi Bambu
3.01.28	Kursi Rotan
3.01.29	Kursi Kain
3.01.30	Kursi Kulit
3.01.31	Kursi Besi
3.01.32	Kursi Aluminium
3.01.33	Kursi Bambu
3.01.34	Kursi Rotan
3.01.35	Kursi Kain
3.01.36	Kursi Kulit
3.01.37	Kursi Besi
3.01.38	Kursi Aluminium
3.01.39	Kursi Bambu
3.01.40	Kursi Rotan
3.01.41	Kursi Kain
3.01.42	Kursi Kulit
3.01.43	Kursi Besi
3.01.44	Kursi Aluminium
3.01.45	Kursi Bambu
3.01.46	Kursi Rotan
3.01.47	Kursi Kain
3.01.48	Kursi Kulit
3.01.49	Kursi Besi
3.01.50	Kursi Aluminium
3.01.51	Kursi Bambu
3.01.52	Kursi Rotan
3.01.53	Kursi Kain
3.01.54	Kursi Kulit
3.01.55	Kursi Besi
3.01.56	Kursi Aluminium
3.01.57	Kursi Bambu
3.01.58	Kursi Rotan
3.01.59	Kursi Kain
3.01.60	Kursi Kulit
3.01.61	Kursi Besi
3.01.62	Kursi Aluminium
3.01.63	Kursi Bambu
3.01.64	Kursi Rotan
3.01.65	Kursi Kain
3.01.66	Kursi Kulit
3.01.67	Kursi Besi
3.01.68	Kursi Aluminium
3.01.69	Kursi Bambu
3.01.70	Kursi Rotan
3.01.71	Kursi Kain
3.01.72	Kursi Kulit
3.01.73	Kursi Besi
3.01.74	Kursi Aluminium
3.01.75	Kursi Bambu
3.01.76	Kursi Rotan
3.01.77	Kursi Kain
3.01.78	Kursi Kulit
3.01.79	Kursi Besi
3.01.80	Kursi Aluminium
3.01.81	Kursi Bambu
3.01.82	Kursi Rotan
3.01.83	Kursi Kain
3.01.84	Kursi Kulit
3.01.85	Kursi Besi
3.01.86	Kursi Aluminium
3.01.87	Kursi Bambu
3.01.88	Kursi Rotan
3.01.89	Kursi Kain
3.01.90	Kursi Kulit
3.01.91	Kursi Besi
3.01.92	Kursi Aluminium
3.01.93	Kursi Bambu
3.01.94	Kursi Rotan
3.01.95	Kursi Kain
3.01.96	Kursi Kulit
3.01.97	Kursi Besi
3.01.98	Kursi Aluminium
3.01.99	Kursi Bambu
3.02	Meubel Roda
3.02.01	Meubel Roda
3.02.02	Meubel Roda
3.02.03	Meubel Roda
3.02.04	Meubel Roda
3.02.05	Meubel Roda
3.02.06	Meubel Roda
3.02.07	Meubel Roda
3.02.08	Meubel Roda
3.02.09	Meubel Roda
3.02.10	Meubel Roda
3.02.11	Meubel Roda
3.02.12	Meubel Roda
3.02.13	Meubel Roda
3.02.14	Meubel Roda
3.02.15	Meubel Roda
3.02.16	Meubel Roda
3.02.17	Meubel Roda
3.02.18	Meubel Roda
3.02.19	Meubel Roda
3.02.20	Meubel Roda
3.02.21	Meubel Roda
3.02.22	Meubel Roda
3.02.23	Meubel Roda
3.02.24	Meubel Roda
3.02.25	Meubel Roda
3.02.26	Meubel Roda
3.02.27	Meubel Roda
3.02.28	Meubel Roda
3.02.29	Meubel Roda
3.02.30	Meubel Roda
3.02.31	Meubel Roda
3.02.32	Meubel Roda
3.02.33	Meubel Roda
3.02.34	Meubel Roda
3.02.35	Meubel Roda
3.02.36	Meubel Roda
3.02.37	Meubel Roda
3.02.38	Meubel Roda
3.02.39	Meubel Roda
3.02.40	Meubel Roda
3.02.41	Meubel Roda
3.02.42	Meubel Roda
3.02.43	Meubel Roda
3.02.44	Meubel Roda
3.02.45	Meubel Roda
3.02.46	Meubel Roda
3.02.47	Meubel Roda
3.02.48	Meubel Roda
3.02.49	Meubel Roda
3.02.50	Meubel Roda
3.02.51	Meubel Roda
3.02.52	Meubel Roda
3.02.53	Meubel Roda
3.02.54	Meubel Roda
3.02.55	Meubel Roda
3.02.56	Meubel Roda
3.02.57	Meubel Roda
3.02.58	Meubel Roda
3.02.59	Meubel Roda
3.02.60	Meubel Roda
3.02.61	Meubel Roda
3.02.62	Meubel Roda
3.02.63	Meubel Roda
3.02.64	Meubel Roda
3.02.65	Meubel Roda
3.02.66	Meubel Roda
3.02.67	Meubel Roda
3.02.68	Meubel Roda
3.02.69	Meubel Roda
3.02.70	Meubel Roda
3.02.71	Meubel Roda
3.02.72	Meubel Roda
3.02.73	Meubel Roda
3.02.74	Meubel Roda
3.02.75	Meubel Roda
3.02.76	Meubel Roda
3.02.77	Meubel Roda
3.02.78	Meubel Roda
3.02.79	Meubel Roda
3.02.80	Meubel Roda
3.02.81	Meubel Roda
3.02.82	Meubel Roda
3.02.83	Meubel Roda
3.02.84	Meubel Roda
3.02.85	Meubel Roda
3.02.86	Meubel Roda
3.02.87	Meubel Roda
3.02.88	Meubel Roda
3.02.89	Meubel Roda
3.02.90	Meubel Roda
3.02.91	Meubel Roda
3.02.92	Meubel Roda
3.02.93	Meubel Roda
3.02.94	Meubel Roda
3.02.95	Meubel Roda
3.02.96	Meubel Roda
3.02.97	Meubel Roda
3.02.98	Meubel Roda
3.02.99	Meubel Roda

Gambar 1. Penjelasan Kodeklasi BMN

Sebagai contoh, ketika melakukan pengreputan aset berupa "perangkat komputer" pada aplikasi SAKTI, terdapat 2 (dua) pilihan kode barang, yaitu:

1. Personal Komputer (3.08.XXXXX.XXX)
2. P.C Unit (3.10.XXXXX.XXX)





Gambar 2: Kebijakan Kodifikasi BMN untuk Persediaan di Mahkamah Agung

Masing Masing BMN Entitas Persediaan (tan Meas)		
301 Persediaan	302 Persediaan	303 Persediaan Lainnya
301.1 Persediaan Bahan	302.1 Persediaan Bahan	303.1 Persediaan Lainnya
301.2 Persediaan Bahan	302.2 Persediaan Bahan	303.2 Persediaan Lainnya
301.3 Persediaan Bahan	302.3 Persediaan Bahan	303.3 Persediaan Lainnya
301.4 Persediaan Bahan	302.4 Persediaan Bahan	303.4 Persediaan Lainnya
301.5 Persediaan Bahan	302.5 Persediaan Bahan	303.5 Persediaan Lainnya
301.6 Persediaan Bahan	302.6 Persediaan Bahan	303.6 Persediaan Lainnya

Gambar 3: Kebijakan Kodifikasi BMN untuk Peralatan dan Meas di Mahkamah Agung

## B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Ragan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LRAK ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Negeri Bantul. Oleh karena itu, pelaporan BMN harus disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodifikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Ragan Akun Standar.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Meas, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap,



atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBMF diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

### C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jembatan, koleksi perpustakaan, dan barang berwujud seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (satu rupiah) atau lebih.



Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

Penerapan batasan kapitalisasi ini mengacu pada prinsip materialitas dalam akuntansi BMN dengan nilai di bawah batas tertentu dianggap tidak material dan cukup dilaporkan dalam CaLK. Sementara itu, BMN dengan nilai material di atas batas tersebut harus dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset dalam Neraca agar posisi keuangan pemerintah dapat tercermin secara akurat.

Kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek *cost-benefit* guna menghindari penyajian BMN yang terlalu rinci, yang dapat menambah beban administratif tanpa memberikan manfaat informasi yang signifikan. Dengan demikian, pengelolaan BMN, baik yang dikapitalisasi maupun tidak, dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

#### D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Negeri Bantul, dalam LKRP Tahunan Tahun 2023, telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PN/KM/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyusutan nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.



4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.K.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat untuk Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 329/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Untuk mendukung penerapan kebijakan penyusutan Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.K.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat untuk Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 329/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi instansi pemerintah pusat dalam menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Paket kebijakan tentang penyusutan Barang Milik Negara (BMN) menjelaskan serangkaian langkah yang wajib diikuti oleh entitas pemerintah pusat, khususnya dalam hal menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan penyusutan aset tetap. Paket ini juga dilengkapi dengan contoh kasus yang mencakup pemilihan masa manfaat, perhitungan penyusutan, hingga pengungkapannya dalam Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CREMN).

Ketersediaan paket kebijakan ini sangat penting untuk memastikan penerapan penyusutan aset tetap BMN secara seragam dan konsisten di seluruh instansi pemerintah pusat. Dengan demikian, informasi penyusutan yang dihasilkan akan lebih andal, relevan, dan dapat dibandingkan, sehingga mendukung pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan dan penyajian penyusutan. Dengan mematuhi pedoman ini secara disiplin, petugas pengelola BMN di setiap instansi dapat



menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam menjaga aset negara yang menjadi tanggung jawab mereka.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyusutan BMN memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan aset tetap BMN yang terhut, etiken, optimal, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan dan aset negara demi kepentingan bangsa dan negara. Penerapan penyusutan aset tetap BMN sangat penting untuk mencerminkan nilai aset tetap yang sebenarnya dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan Laporan Keuangan. Informasi penyusutan juga sangat diperlukan untuk perencanaan penggantian aset tetap yang telah habis masa manfaatnya.

Dengan mematuhi ketentuan penyusutan yang berlaku, pengelolaan aset tetap BMN menjadi lebih teratur dan sesuai dengan standar akuntansi yang baik. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BMN.

#### E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara.

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADENA (Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.



Gambar 4. Rekonsiliasi Nilai BMM melalui aplikasi E-SADENA

### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Tahunan Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMM yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Bantul. Nilai BMM gabungan Laporan Barang Kuasa Pengguna (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Semester II Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebesar Rp29.382.261.207,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah), yang merupakan nilai BMM berupa saldo awal laporan sebesar Rp29.549.021.207,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah) dengan nilai mutasi tambah sebesar Rp14.556.556.290,00 (empat belas milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan mutasi pengurangan sebesar Rp 14.543.316.290,00 (empat belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terjadi selama Tahunan Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMM tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMM yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMM yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMM yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMM yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.



Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Pelaksanaan Internal Data BMN
2. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gekongan);
6. Laporan Penyusutan;
7. Laporan Penyusutan Intrakomptabel;
8. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel;
9. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN);
10. Laporan PNBFP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
11. Laporan Pelaksanaan Penganggaran BMN; dan
12. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

#### IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

##### A. Saldo Awal

Nilai Saldo awal BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp29.569.021.207,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp29.343.942.017,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp22.079.190,00 (dua puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

##### B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025

Mutasi Barang Milik Negara Periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

##### 1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri bertam sebesar Rp12.323.773,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp15.081.300,00 (lima belas juta delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), mutasi tambah sebesar Rp81.894.554,00 (delapan puluh



satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp84.450.079,00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima ribu sembilan puluh empat)

Mutasi Barang Persediaan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo Awal 2025		Rp 12.525.779,00
Mutasi Tambah :		
M02	Pembelian	Rp 81.894.884,00
M12	Transfer Masuk Online	-
M22	Korupsi Nilai Tambah	-
M10	Reklasifikasi Masuk	-
M11	Reklasifikasi Dari Aset	-
M20	Korupsi Transfer Keluar Online	-
M24	Hibah (Masuk)	-
M25	Batal Cater Usang Rusak	-
M26	Perolehan Lainnya	-
M28	Korupsi Kuantitas Tambah	-
M31	Saldo Awal	-
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>Rp 81.894.884,00</b>
Mutasi Kurang :		
C28	Rusak	-
C26	Keluar Lainnya	-
C25	Korupsi Nilai Kurang	-
C24	Usang	-
C31	Reklasifikasi ke Aset	-
K21	hasil Dynamic Risk	-
C20	Reklasifikasi Keluar	-
C29	Korupsi Kuantitas Kurang	-
C23	Transfer Keluar Online	-
C21	habis Pakai	Rp 84.450.079,00
<b>Mutasi Berkurang</b>		<b>Rp 84.450.079,00</b>
<b>Saldo 31 Desember 2025</b>		<b>Rp 12.525.779,00</b>

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Penyajian persediaan per 31 Desember 2025 sudah melalui proses pelaksanaan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan dalam kondisi baik, rusak, dan usang.

## 2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Berang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri



Periode 31 Desember 2015 seluas 5.895 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp17.438.690.000,00 (Tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 5.895 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp17.438.690.000,00 (Tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp7.266.999.000,00 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp7.266.999.000,00 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	SaldoAwal	SaldoAkhir
<b>Saldo Awal</b>			
000	Saldo Awal Tanah	Rp 17.438.690.000,00	Rp 0,00
<b>Mutasi Bertambah</b>			
100	Saldo Awal	Rp 0,00	Rp 0,00
101	Pembelian	Rp 0,00	Rp 0,00
102	Transfer Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
103	Hibah Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
107	Klasifikasi Masuk	Rp 7.266.999.000,00	Rp 0,00
112	Perolehan lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00
204	Corpsi Penetapan Nilai Bertambah	Rp 0,00	Rp 0,00
305	Pengembangan melalui DPT	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 7.266.999.000,00	Rp 0,00
<b>Mutasi Berkurang</b>			
214	Sembor Sewaan	Rp 0,00	Rp 0,00
264	Corpsi Penetapan Nilai Berkurang	Rp 0,00	Rp 0,00
302	Transfer Keluar	Rp 0,00	Rp 0,00
303	Hibah Keluar	Rp 0,00	Rp 0,00
304	Klasifikasi Keluar	(Rp 7.266.999.000,00)	Rp 0,00
305	Corpsi Penetapan	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Berkurang		(Rp 7.266.999.000,00)	Rp 0,00
Saldo		Rp 17.438.690.000,00	Rp 0,00
Akumulasi Penyusutan		Rp 0,00	Rp 0,00
Total (Saldo + Akumulasi Penyusutan)		Rp 17.438.690.000,00	Rp 0,00

Tabel 2. Rincian Mutasi Tanah

Penjelasan terhadap rincian transaksi tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat klasifikasi masuk untuk memindahkan surat Pht Kepala Biro Perencanaan Nomor 203/BUA.4/PL.1.2.5/V/2015 perlu dilakukan perubahan kodefikasi barang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KM.6/2014. Transaksi ini dilakukan sebagai pasang



reklasifikasi keluar dalam rangka penyesuaian kode/klasifikasi tanah sesuai dengan fungsinya;

- b. Reklasifikasi Keluar perbaikan atas perubahan kode/klasifikasi barang yang selanjutnya melakukan Reklasifikasi Masuk;

## 1. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Milik Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode 31 Desember 2025 sebanyak 831 buah dengan nilai sebesar Rp1.932.312.855,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang merupakan nilai SMN berupa saldo awal laporan sebanyak 826 buah dengan nilai sebesar Rp2.919.282.855,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 31 Desember 2025 sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp25.780.000,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp12.540.000,00 (Dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat Pembelian kursi besi/metal sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).
- b. Terdapat Transfer Masuk dari Badan Urusan Administrasi dengan dokumen pendukung BAST Nomor 202/WUA.7/BAST.PL1.2.5/VI/2025 tanggal 18 Juli 2025 sebanyak 3 (tiga) unit size sebesar Rp12.540.000,00 (Dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. Terdapat Reklasifikasi Keluar (Sisa) berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul Nomor 310/SEK.FN.W13-US/SKET.PL1.2/DX/2025 tanggal 17 September 2025 sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp12.540.000,00 (Dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- d. Terdapat Reklasifikasi Masuk (Sisa) berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul Nomor 310/SEK.FN.W13-US/SKET.PL1.2/DX/2025 tanggal 17 September 2025 sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp12.540.000,00 (Dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).



Kode	Uraian	Intrakomptable	Ektrakomptable
<b>Saldo Awal</b>			
000	Saldo awal T&L	Rp 2.800.300.700,00	Rp 28.070.000,00
<b>Mutasi Bertambah</b>			
100	Saldo awal	Rp 0,00	Rp 0,00
101	Pembelian	Rp 0,00	Rp 700.000,00
102	Penjualan lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00
103	Hutang Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
104	Transfer Masuk	Rp 12.500.000,00	Rp 0,00
107	Reklasifikasi Masuk	Rp 12.500.000,00	Rp 0,00
200	Pengembangan Modal Jelas Langsung	Rp 0,00	Rp 0,00
400	Penggunaan kembali Aset yang sudah dihindarkan penggunaan aset	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 0,00	Rp 0,00
104	Pembelian Penghapusan	Rp 0,00	Rp 0,00
108	Asal Transfer Keluar	Rp 0,00	Rp 0,00
200	Kontrol Pencatatan Modal Bertambah	Rp 0,00	Rp 0,00
102	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 0,00	Rp 0,00
110	Reklasifikasi Masuk dari Penjualan	Rp 0,00	Rp 0,00
200	Pengembangan Melalui KDP	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Penjualan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Penjualan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	Rp 0,00	Rp 0,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>Rp 25.000.000,00</b>	<b>Rp 700.000,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>			
300	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	Rp 0,00	Rp 0,00
300	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	Rp 0,00	Rp 0,00
302	Reklasifikasi Keluar ke Penjualan	Rp 0,00	Rp 0,00
303	Kontrol Manual	Rp 0,00	Rp 0,00
305	Kontrol Pencatatan	Rp 0,00	Rp 0,00
306	Reklasifikasi Keluar	Rp 12.500.000,00	Rp 0,00
307	Transfer Keluar	Rp 0,00	Rp 0,00
340	Kontrol Pencatatan Modal Berkurang	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Penghapusan Aset Dari Penggunaan	Rp 0,00	Rp 0,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>Rp 12.500.000,00</b>	<b>Rp 0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>Rp 2.800.300.700,00</b>	<b>Rp 28.070.000,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(Rp 2.990.979.919,00)</b>	<b>(Rp 24.815.405,00)</b>

Tabel 3. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Penjelasan terhadap rincian transaksi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

- Pembelian Peralatan Mesin sebanyak 2 (dua) buah berupa karu besi/metal, merupakan pengadaan peralatan mesin yang sumber pembayarannya dari APBN;



- b. Transfer Masuk Peralatan Mesin sebanyak 3 (tiga) buah berupa sofa merupakan transfer masuk dari Badan Urusan Administrasi.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Besar (3.01)

Tidak terdapat alat besar (3.01) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan (3.02) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

KRI	ALAT ANGIKUTAN	SALDO AWAL PERIODE		MUTASI PERIODE		SALDO AKHIR PERIODE	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
	Saldo Awal Periode 2024	13	886.019.000	13	886.019.000	0	0
	Saldo Akhir Periode 2024	13	886.019.000	13	886.019.000	0	0
	Saldo Tambah						
	110. Gada Baru	0	0	0	0	0	0
	111. Perbaikan	0	0	0	0	0	0
	112. Transfer Masuk	0	0	0	0	0	0
	113. Gada Bekas	0	0	0	0	0	0
	114. Saldo Bekas	0	0	0	0	0	0
	115. Pengalokasian Kemungkinan Barang	0	0	0	0	0	0
	116. Pembelian Kembali	0	0	0	0	0	0
	117. Pengalokasian Bekas	0	0	0	0	0	0
	118. Pengalokasian Lain-lain	0	0	0	0	0	0
	119. Saldo Transfer Masuk	0	0	0	0	0	0
	120. Pengalokasian Nilai Jasa (Langsung)	0	0	0	0	0	0
	121. Saldo Perawatan Nilai Bekas	0	0	0	0	0	0
	122. Pengalokasian kembali 20% pengalokasian	0	0	0	0	0	0
	Saldo Akhir Periode 2025	13	886.019.000	13	886.019.000	0	0
	Saldo Bekas Tambah						
	Saldo Bekas						
	123. Transfer Masuk	0	0	0	0	0	0
	124. Pengalokasian Bekas	0	0	0	0	0	0
	125. Saldo Perawatan	0	0	0	0	0	0
	126. Pengalokasian dan Baru Pengalokasian	0	0	0	0	0	0
	Saldo Akhir Periode 2025	13	886.019.000	13	886.019.000	0	0

Tabel 4. Rincian Mutasi Alat Angkutan

3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Tidak terdapat Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

4) Alat Pertanian (3.04)

Tidak terdapat Alat Pertanian (3.04) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.



### 5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

KRS	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	WIBUNDA UTAMA & DIBUNDA OPTIMAL		DIBUNDA OPTIMAL		DIBUNDA OPTIMAL	
		QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI
	Saldo Awal 1 Januari 2023	871	1.818.887.887	869	1.817.818.887	869	1.817.818.887
	Saldo Awal 1 Januari 2023	867	1.817.818.887	866	1.817.818.887	866	1.817.818.887
	Mutasi Tambah						
001	Acara Kerja	0	0	0	0	0	0
002	Pembelian	0	702.000	0	0	0	702.000
003	Transfer Uang	0	1.021.000	0	11.200.000	0	0
004	Transfer Uang	0	1.021.000	0	0	0	0
	Jumlah Saldo Tambah	0	1.724.000	0	11.200.000	0	702.000
	Mutasi Kurang						
001	Transfer Uang	0	0	0	0	0	0
002	Transfer Uang	0	0	0	0	0	0
003	Transfer Uang	0	0	0	0	0	0
004	Transfer Uang	0	1.021.000	0	11.200.000	0	0
005	Transfer Uang	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Saldo Kurang	0	1.021.000	0	11.200.000	0	0

Tabel 5. Rincian Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga

### 6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

KRS	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI & PEMANCAR	WIBUNDA UTAMA & DIBUNDA OPTIMAL		DIBUNDA OPTIMAL		DIBUNDA OPTIMAL	
		QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI
	Saldo Awal 1 Januari 2023	10	628.172.810	10	628.172.810	0	0
	Saldo Awal 1 Januari 2023	10	628.172.810	10	628.172.810	0	0
	Mutasi Tambah						
001	Acara Kerja	0	0	0	0	0	0
002	Pembelian	0	0	0	0	0	0
003	Transfer Uang	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Saldo Tambah	0	0	0	0	0	0
	Mutasi Kurang						
001	Transfer Uang	0	0	0	0	0	0
002	Transfer Uang	0	0	0	0	0	0
003	Transfer Uang	0	0	0	0	0	0
004	Transfer Uang	0	0	0	0	0	0
005	Transfer Uang	0	0	0	0	0	0
006	Penghapusan User dan Pemakaian	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Saldo Kurang	0	0	0	0	0	0

Tabel 6. Rincian Mutasi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar



7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Tidak terdapat Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) ) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

8) Alat Laboratorium (3.08)

Tidak terdapat Alat Laboratorium (3.08) ) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

9) Alat Peralatan (3.09)

Tidak terdapat Alat Peralatan (3.09) ) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

10) Komputer (3.10)

Saldo Komputer (3.10) ) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rinci sebagai berikut :

K/L	KETERANGAN	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		SALDO	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
	Saldo per 31 Desember 2023	120	1.677.931.620	120	1.678.931.620	0	1.678.931.620
	Saldo per 1 Januari 2024	120	1.677.931.620	120	1.678.931.620	0	1.678.931.620
	Tambah Tambah						
100	Saldo Awal	0	0	0	0	0	0
101	Pembelian	0	0	0	0	0	0
102	Transfer Masuk	0	0	0	0	0	0
103	Wajib Masuk	0	0	0	0	0	0
100	Pembelian Penghapusan	0	0	0	0	0	0
101	Pembelian Utang	0	0	0	0	0	0
	Tambah Hapus Tambah	0	0	0	0	0	0
	Hapus Hapus						
104	Saldo Pembelian Utang Perpanjang	0	0	0	0	0	0
100	Transfer Masuk	0	0	0	0	0	0
101	Pembelian Utang	0	0	0	0	0	0
102	Saldo Pembelian	0	0	0	0	0	0
103	Penghapusan Jasa Dan Perawatan	0	0	0	0	0	0
	Tambah Hapus Hapus	0	0	0	0	0	0

Tabel 7. Rincian Mutasi Komputer

11) Alat Eksplorasi (3.11)

Tidak terdapat Alat Eksplorasi (3.11) pada Pengadiln Negeri Bantul



Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

- 12) **Alat Penggeboran (3.12)**  
Tidak Terdapat Alat Penggeboran (3.12) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 13) **Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)**  
Tidak Terdapat Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 14) **Alat Bantu Eksplorasi (3.14)**  
Tidak terdapat Alat Bantu Eksplorasi (3.14) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 15) **Alat Keselamatan Kerja (3.15)**  
Tidak terdapat Alat Keselamatan Kerja (3.15) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 16) **Alat Peraga (3.16)**  
Tidak terdapat Alat Peraga (3.16) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 17) **Peralatan Proses/Produksi (3.17)**  
Tidak Terdapat Peralatan Proses/Produksi (3.17) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 18) **Rambu-Rambu (3.18)**  
Tidak terdapat Rambu-Rambu (3.17) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 19) **Peralatan Olahraga (3.19)**  
Tidak Terdapat Peralatan Olahraga (3.19) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.



#### Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Pengadiln Negeri Bantul Tahunan Tahun 2025 sebesar Rp3.607.825.318,00 (Tiga milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

#### Monitoring Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp700.000,00 dengan rincian menjadi aset sebagai berikut:

Kategori Barang	Nilai	Keterangan
Peralatan Mesin	Rp 700.000,00	Belanja Modal Peralatan Mesin direalisasikan sesuai

Tabel 6. Monitoring Belanja Modal Peralatan dan Mesin

#### 4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Negeri Pengguna Pengadiln Negeri Bantul Periode 31 Desember 2025 sebanyak 9 unit dengan nilai sebesar Rp7.776.274.290,00 (Tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang merupakan nilai BHN berupa saldo awal laporan sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp7.776.274.290,00 (Tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 31 Desember 2025 sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp7.264.177.290,00 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Mutasi kurang yang terjadi adalah sebanyak 2 unit dengan nilai Rp7.264.177.290,00 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).



Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intakumulatif	Ditakumulatif
<b>Saldo Awal</b>			
000	Saldo Awal 2015	Rp 7.776.374.100,00	Rp 0,00
<b>Mutasi Bertambah</b>			
100	Saldo Awal	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Pembelian	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Transfer Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
100	Hibah Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
106	Penyiswaan Pombangunan Banga	Rp 0,00	Rp 0,00
106	Pembatalan Penghapusan	Rp 0,00	Rp 0,00
107	Reklasifikasi Masuk	Rp 8.187.478.280,00	Rp 0,00
112	Perolehan lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00
113	Penyiswaan Pombangunan Janga	Rp 0,00	Rp 0,00
113	Reklasifikasi Masuk dan Perolehan	Rp 0,00	Rp 0,00
120	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra	Rp 0,00	Rp 0,00
200	Pengembangan Nilai Aset Langsur	Rp 0,00	Rp 0,00
204	Koreksi Pencatatan nilai Bertambah	Rp 1.109.788.000,00	Rp 0,00
206	Penggunaan Aset Tetap Berwujud	Rp 0,00	Rp 0,00
206	Pengembangan Melalui IPP	Rp 0,00	Rp 0,00
206	Koreksi Manual	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 7.297.177.280,00	Rp 0,00
<b>Mutasi Berkurang</b>			
214	Koreksi Saluran	Rp 0,00	Rp 0,00
226	Koreksi Pencatatan nilai Berkurang	Rp 0,00	Rp 0,00
300	Penghapusan	Rp 0,00	Rp 0,00
300	Transfer Saluran	Rp 0,00	Rp 0,00
300	Hibah Saluran	Rp 0,00	Rp 0,00
304	Reklasifikasi Saluran	(Rp 7.188.177.280,00)	Rp 0,00
305	Koreksi Pencatatan	Rp 0,00	Rp 0,00
309	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Inta	Rp 0,00	Rp 0,00
400	Penggunaan Aset Dari Penggunaan	Rp 0,00	Rp 0,00
400	Penggunaan kembali SPP yang sudah dibersihkan pencatatan	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Berkurang		(Rp 7.188.177.280,00)	Rp 0,00
Saldo		Rp 7.776.374.280,00	Rp 0,00
Akumulasi Penyusutan		(Rp 8.709.228.840,00)	Rp 0,00
Total (Saldo + Akumulasi Penyusutan)		Rp 3.068.257.440,00	Rp 0,00

Tabel 9. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

- Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 2 digabung ke dalam Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1.



- b. Koreksi Perubahan Nilai Bertambah akibat dari koreksi pada poin a
- c. Reklasifikasi Keluar Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terjadi karena perubahan kodefikasi BNN.
- d. Reklasifikasi Masuk Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terjadi karena perubahan kodefikasi BNN.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung (401) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun 2025 serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

KDL	KETERANGAN	SALDO AWAL PERIODE		MUTASI TAHUNAN		SALDO AKHIR PERIODE	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
401	Bangunan Gedung	0	Rp 7.216.274.290,00	0	Rp 7.216.274.290,00	0	0
401	Bangunan Gedung	0	Rp 7.216.274.290,00	0	Rp 7.216.274.290,00	0	0
	Mutasi Tambah						
401	Bahan Baku	0	0	0	0	0	0
401	Perbaikan	0	0	0	0	0	0
401	Transfer Masuk	0	0	0	0	0	0
401	Utang Masuk	0	0	0	0	0	0
401	Mutasi/Transfer Masuk	0	0,000,000,000	0	0,000,000,000	0	0
401	Saldo/Perbaikan/Umur Berkasambah	0	1,216,274,290,00	0	1,216,274,290,00	0	0
	Jumlah Mutasi Tambah	0	1,216,274,290,00	0	1,216,274,290,00	0	0
	(Salut) Saldo						
401	Mutasi/Transfer Keluar	0	(7.216.274.290,00)	0	(7.216.274.290,00)	0	0
	Jumlah Mutasi Kurang	0	(7.216.274.290,00)	0	(7.216.274.290,00)	0	0

Tabel 10. Rincian Mutasi Bangunan dan Gedung

2) Monumen (402)

Tidak terdapat Monumen (402) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

3) Bangunan Menara (403)

Tidak terdapat Bangunan Menara (403) pada Pengadiln Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

4) Tugu Titik Kontrol/Fasr (404)

Saldo Titik Kontrol/Fasr (404) pada Pengadiln Negeri Bantul



Periode Tahunan Tahun 2025 serta mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

KRS	PUSKAPUS KEMENTERIAN, PASTI	KUMULASI UTUK & SOPERSALDIPTASAL		UTUK ANCIPTASAL		SOPERSALDIPTASAL	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
	Saldo per 31 Desember 2023	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
	Saldo per 1 Januari 2024	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
	Mutasi Tambah						
100	Saldo Awal	0	0	0	0	0	0
101	Pembelian	0	0	0	0	0	0
102	Mutasi Hapus	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Mutasi Tambah	0	0	0	0	0	0
	Mutasi Kurang						
200	Saldo Perolehan Utuk Berkembang	0	0	0	0	0	0
201	Berkembang Utuk	0	0	0	0	0	0
202	Saldo Perolehan	0	0	0	0	0	0
203	Penghapusan Kekal/Utuk Dan Garis/Utuk	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Mutasi Kurang	0	0	0	0	0	0

Tabel 11. Rincian Mutasi Utuk Tidak Kontrol/Pasi

#### Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun 2025 sebesar Rp6.104.538.185,00 (*enam milyar seratus empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah*).

#### 5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Tidak terdapat jalan, jembatan, irigasi dan jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

#### 6. Aset Tetap Renovasi

Tidak terdapat Aset Tetap Renovasi Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

#### 7. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode 31 Desember 2023 sebanyak 5.972 buah dengan nilai sebesar Rp48.742.062,00 (*empat puluh delapan juta tiga ratus*



empat puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebanyak 5.972 buah dengan nilai sebesar Rp48.342.062,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh dua rupiah). Tidak terdapat nilai mutasi tambah dan mutasi keluar.

Rincian Mutasi Asat Tetap lainnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intrakompleksi	Ekstrakompleksi
<b>Saldo Awal</b>			
000	Saldo Awal Tert.	Rp48.342.062,00	Rp 0,00
<b>Mutasi Bertambah</b>			
100	Saldo Awal	Rp 0,00	Rp 0,00
101	Pembelian	Rp 0,00	Rp 0,00
102	Transfer Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
103	Hibah Masuk	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 0,00	Rp 0,00
<b>Mutasi Berkurang</b>			
201	Koreksi Pencatatan Awal Berkurang	Rp 0,00	Rp 0,00
202	Transfer Keluar	Rp 0,00	Rp 0,00
203	Hibah Keluar	Rp 0,00	Rp 0,00
204	Koreksi Pencatatan	Rp 0,00	Rp 0,00
205	Penghapusan Awal Dan Pengukuran	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Berkurang		Rp 0,00	Rp 0,00
Saldo		Rp 48.342.062,00	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Pengukuran		Rp 0,00	Rp 0,00
Total (Saldo + Jumlah Mutasi Pengukuran)		Rp 48.342.062,00	Rp 0,00

Tabel 12. Rincian Mutasi Asat Tetap Lainnya

Rincian mutasi Asat Tetap Lainnya per bidang adalah sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan (601)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Berang Kueser Pengguna Perpustakaan Negeri Benteng Periode 21 Desember 2025 sebanyak 5.972 buah dengan nilai sebesar Rp48.342.062,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebanyak 5.972 buah dengan nilai sebesar Rp48.342.062,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh dua rupiah). Tidak terdapat nilai mutasi tambah dan mutasi keluar.



2) Barang Bercorak (602)

Tidak terdapat Barang Bercorak (602) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

3) Tanaman (605)

Tidak terdapat Tanaman (605) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Bantul Tahunan Tahun 2025 sebesar Rp0 (nol rupiah).



## V. BMN PADA PENGADILAN NEGARA BANTUL PER 31 Desember 2025

### A. BMN per Akun Neraca

Nilai Barang Milik Negara per akun neraca disajikan pada tabel berikut :

No	Akun Neraca	Nilai Bruto Periode Tahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	POSISI BMN DI NERACA (AksiQ)	21.328.336.338,00	(1.447.709.899,00)	19.880.626.439,00
A	ASET LANCAR	19.861.380,00	(2.888.828,00)	16.972.552,00
1	Persediaan	19.861.380,00	(1.550.528,00)	18.310.852,00
8	ASET TETAP	21.312.288.958,00	(1.450.280.180,00)	19.862.008.778,00
1	Tanah	17.828.890.000,00	0	17.828.890.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.828.009.708,00	12.840.000	3.840.849.708,00
3	Godong dan Bangunan	7.962.706.250,00	0	7.962.706.250,00
4	Jalan, Jembatan, dan Jembatan	0	0	0
5	Aset Tetap dalam Rotorasi	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	48.542.082,00	0	48.542.082,00
7	Centriale Dalam Rotorasi	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8.211.898.918,00)	(1.460.891.180,00)	(9.672.790.098,00)
11	BMN NON NERACA	28.299.878,00	(3.868.230,00)	24.431.648,00
1	Ekstrakompak	23.079.150,00	700.000,00	23.779.150,00
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakompak	(12.780.279,00)	(4.080.250,00)	(16.860.529,00)
11	TOTAL GABUNGAN (1 + 11)	21.356.636.404,00	(1.451.578.029,00)	19.905.058.375,00

Tabel 13. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca



## B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan disajikan pada tabel berikut:

NO	PERIKHAAN NERACA	SAK	ASET BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA (AKAS)	29.878.496.134,00	29.878.496.134,00	29.878.496.134,00
A	ASET LANCAR	12.525.775,00	12.525.775,00	12.525.775,00
A.1	Persediaan	12.525.775,00	12.525.775,00	12.525.775,00
B	ASET TETAP	19.862.964.389,00	19.862.964.389,00	19.862.964.389,00
B.1	Tanah	17.835.890.000,00	17.835.890.000,00	17.835.890.000,00
B.2	Peralatan dan Meubel	3.908.743.708,00	3.908.743.708,00	3.908.743.708,00
B.3	Gedung dan Bangunan	7.962.708.290,00	7.962.708.290,00	7.962.708.290,00
B.4	Jalan, Jembatan, dan Jembatan	0	0	0
B.5	Aset Tetap Lainnya	48.542.062,00	48.542.062,00	48.542.062,00
B.6	Restrukturisasi Dalam Pengadaan	0	0	0
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(9.895.517.895,00)	(9.895.517.895,00)	(9.895.517.895,00)
B	BMN NON NERACA	6.993.346,00	6.993.346,00	6.993.346,00
1	Ekstrakompabel	22.779.180,00	22.779.180,00	22.779.180,00
2	Akum. Penyusutan Ekstrakompabel	(16.845.800,00)	(16.845.800,00)	(16.845.800,00)
III	TOTAL (1+2)	29.862.423.480,00	29.862.423.480,00	29.862.423.480,00

Tabel 14. Perbandingan Nilai BMN pada LRP dan LK

## VI. INFORMASI BMN LAINNYA

### A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakompabel dan ekstrakompabel) selama 4 (empat) periode laporan Tahunan, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persentase
1	Laporan Tahunan 2011	29.361.600.631	-	-
2	Laporan Tahunan 2012	29.647.738.131	285.957.500	0,96 %
3	Laporan Tahunan 2014	29.540.021.107	(78.714.924)	-0,27 %
4	Laporan Tahunan 2015	29.592.249.107	13.240.000	0,045 %

Tabel 15. Perkembangan Nilai BMN Pengadaan Negeri Bentang per Periode Laporan Tahunan



## B. Informasi Pengelolaan BMN

### 1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	MILAI (Rp)	KUANTITAS	MILAI (Rp)
1	Tanah	0	0	9	17.432.400.000
2	Alas Angkutan Bermotor	0	0	13	896.000.328
3	Peralatan dan Meubel Non TIK	0	0	472	1.110.447.287
4	Peralatan dan Meubel TIK	0	0	348	1.935.825.240
5	Bangunan Gedung	0	0	2	6.346.841.290
6	Rumah Negeri	0	0	8	1.415.565.000
7	Jasa Tetap lainnya	0	0	5.972	48.342.042
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.822</b>	<b>29.582.261.297</b>

Tabel 16. Penetapan Status Penggunaan BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

### 2. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Bantul selama periode Tahunan Takwim 2023 disajikan dalam tabel berikut:



No	Uraian	Penggunaan	Pemeliharaan	Pembelian langganan	Pemeliharaan Penggunaan	UIN Tanjung	UIN Bandung	Jumlah
1	Dalam proses pengisian permohonan ke Pengadilan Serang	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengisian permohonan ke Pengadilan Serang	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengadilan Serang	0	0	0	0	0	0	0
4	Salinan di Pengadilan Serang	0	0	0	0	0	0	0
5	di Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0
6	di Serang	0	0	0	0	0	0	0
7	Dalam proses untuk lanjut ke Pengadilan Serang	0	0	0	0	0	0	0
8	Tidak diberikan tanggapan oleh Pengadilan Serang	0	0	0	0	0	0	0
9	Tidak lanjut oleh Pengadilan Serang	0	0	0	0	0	0	0
10	Salinan untuk ke Pengadilan Serang	0	0	0	0	0	0	0
11	Salin/ Dital proses oleh Pengadilan Serang	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 17. Pengalokasian ERM di Lingkungan Pengadilan Negeri Serang



### 3. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditawarkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan keban sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah ditribukan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Salinan surat terima kepada Pengelola	-

Tabel 18. Pengelolaan BMN Idle di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

### 4. Pengasuransian BMN

Pengadilan Negeri Bantul mengajukan asuransi BMN kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN sebesar Rp3.009.756.000,00 (tiga milyar seribu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan nilai premi sebesar Rp9.824.132,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dengan total aset yang diasuransikan sebanyak 1 aset. Jangka waktu pengasuransian BMN adalah 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Hal tersebut dilakukan demi pengamanan aset yang dikuasai oleh seluruh satuan kerja.

No	Jumlah BMN Yang Diasuransikan	Nilai Perolehan	Nilai Kontrak Pengasuransian
1	1	Rp3.009.756.000,00	Rp9.824.132,00

Tabel 19. Pengasuransian BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

### C. BMN Dari Dana Dekonstrasi

Tidak terdapat Barang Milik Negara dari dana dekonstrasi pada laporan Tahunan Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2025.

### D. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Tidak terdapat Barang Milik Negara pada satuan kerja Badan Layanan Umum pada laporan Tahunan Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2025.



**E. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)**

Tidak terdapat Barang Milik Negara dari belanja lain-lain pada Laporan Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2023.

**F. BMN Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang**

Tidak Terdapat Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2023.

**G. BMN Berupa EPYBOS**

Tidak terdapat BMN yang masuk sebagai EPYBOS pada Laporan Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2023.

**H. Usulan Barang Hibah DK/TP**

Tidak terdapat Usulan Barang Hibah DK/TP pada Laporan Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2023.

**I. Aset Properti Investasi**

Tidak terdapat Aset Properti Investasi yang masuk pada Laporan Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2023.

**J. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN**

Tidak Terdapat Permasalahan dalam Pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Laporan Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2023.

**K. Pengungkapan Penting Lainnya**

**1. Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung mengeluarkan suatu regulasi penting dalam tata kelola aset melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/SK/PL.1.2.2/X/2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143 /KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku 1 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kalemungkinan Peradilan, Administrasi Kepagawanan Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Perurutan, Tata Keanggotaan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehormatan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung



Pengadilan Dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Keputusan ini menjadi pedoman baru standarisasi tata ruang, sarana dan prasarana, prototipe gedung kantor pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya karena pedoman sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan peradilan saat ini.

## 1. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Laporan PNBPN dari BMN

---

Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025

**COMPANIA SRI LANKA INVESTMENTS PROMOTIONS**  
**ශ්‍රී ලංකා විදේශ ආකර්ෂණ සංස්ථාව**  
**මහලු මහලු මාවත**  
**සමාජ සංස්ථාපන සේවා සංස්ථාව**  
 (පුද්ගල සංස්ථාව)

ආපදා මුදා හැරීමේ කාලය - 08 වැනි වර්ෂයේදී  
 ආදායම් - 01 වැනි වර්ෂයේදී  
 සමාජ සංස්ථාව - 000 වැනි වර්ෂයේදී  
 සමාජ සංස්ථාව - 000 වැනි වර්ෂයේදී

සමාජ සංස්ථාව - 000 වැනි වර්ෂයේදී  
 සමාජ සංස්ථාව - 000 වැනි වර්ෂයේදී  
 සමාජ සංස්ථාව - 000 වැනි වර්ෂයේදී  
 සමාජ සංස්ථාව - 000 වැනි වර්ෂයේදී

වර්ෂය	විස්තරය	වටිනාකම	වටිනාකම			වටිනාකම
			වටිනාකම	වටිනාකම	වටිනාකම	
01	වටිනාකම					
02	වටිනාකම					
03	වටිනාකම					
04	වටිනාකම					
05	වටිනාකම					
06	වටිනාකම					
07	වටිනාකම					
08	වටිනාකම					
09	වටිනාකම					
10	වටිනාකම					
11	වටිනාකම					
12	වටිනාකම					
13	වටිනාකම					
14	වටිනාකම					
15	වටිනාකම					
16	වටිනාකම					
17	වටිනාකම					
18	වටිනාකම					
19	වටිනාකම					
20	වටිනාකම					
21	වටිනාකම					
22	වටිනාකම					
23	වටිනාකම					
24	වටිනාකම					
25	වටිනාකම					
26	වටිනාකම					
27	වටිනාකම					
28	වටිනාකම					
29	වටිනාකම					
30	වටිනාකම					
31	වටිනාකම					
32	වටිනාකම					
33	වටිනාකම					
34	වටිනාකම					
35	වටිනාකම					
36	වටිනාකම					
37	වටිනාකම					
38	වටිනාකම					
39	වටිනාකම					
40	වටිනාකම					
41	වටිනාකම					
42	වටිනාකම					
43	වටිනාකම					
44	වටිනාකම					
45	වටිනාකම					
46	වටිනාකම					
47	වටිනාකම					
48	වටිනාකම					
49	වටිනාකම					
50	වටිනාකම					
51	වටිනාකම					
52	වටිනාකම					
53	වටිනාකම					
54	වටිනාකම					
55	වටිනාකම					
56	වටිනාකම					
57	වටිනාකම					
58	වටිනාකම					
59	වටිනාකම					
60	වටිනාකම					
61	වටිනාකම					
62	වටිනාකම					
63	වටිනාකම					
64	වටිනාකම					
65	වටිනාකම					
66	වටිනාකම					
67	වටිනාකම					
68	වටිනාකම					
69	වටිනාකම					
70	වටිනාකම					
71	වටිනාකම					
72	වටිනාකම					
73	වටිනාකම					
74	වටිනාකම					
75	වටිනාකම					
76	වටිනාකම					
77	වටිනාකම					
78	වටිනාකම					
79	වටිනාකම					
80	වටිනාකම					
81	වටිනාකම					
82	වටිනාකම					
83	වටිනාකම					
84	වටිනාකම					
85	වටිනාකම					
86	වටිනාකම					
87	වටිනාකම					
88	වටිනාකම					
89	වටිනාකම					
90	වටිනාකම					
91	වටිනාකම					
92	වටිනාකම					
93	වටිනාකම					
94	වටිනාකම					
95	වටිනාකම					
96	වටිනාකම					
97	වටිනාකම					
98	වටිනාකම					
99	වටිනාකම					
100	වටිනාකම					



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Laporan Pelaksanaan Pengansuransian BMN

—  
Untuk Periode Yang Berakhir  
pada 31 Desember 2025

## Daftar Laporan Penganggaran BMN Tahun 2023

## Pada Pengadilan Negeri Bantul

No	KPS	Data Barang	Nama Barang	U/P	Label	Tahun Penganggaran	Nilai Realisasi	Penggunaan dan Fungsi BMN	Jangka Waktu	Salinan Fisik	Keterangan
1.	00000000000000000000	000000000	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1	Jl. Pahl Di Sesayama 24, No 00	2023	2023.700.000	Bangunan Gedung Utama	10 Bulan	8.000.000	100,00 (100,00%)



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Laporan BMN berupa Rumah Negara

---





Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Neraca Tingkat Satker

---

Per 31 Desember 2025

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARACENDRA : 001 | MAHAKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : 011 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
WILAYAH/KOVINDO : 0008 | M YONGYAKERTA  
SATUAN KERJA : 000121 | PENGADILAN NEGARA SATELA

Tgl Cetak : 27/01/2026 0:22 AM  
Tgl Data : 27/01/2026 0:23 PM  
Halaman : 1

Url: <http://www.siskep.kemprakt.go.id>

NAMA PERIKUTUAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	12.025.775	10.281.260	(2.000.000)	(16,46)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>12.025.775</b>	<b>10.281.260</b>	<b>(2.000.000)</b>	<b>(16,46)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	17.233.090.000	17.233.090.000	0	0,00
Peralatan dan Meubel	6.099.715.708	5.836.283.708	(263.432.000)	(4,32)
Gedung dan Bangunan	7.940.795.290	7.940.795.290	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	48.343.062	48.343.062	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3.009.017.394)	(3.282.086.711)	(273.069.317)	(11,37)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>18.062.945.666</b>	<b>17.315.350.350</b>	<b>(747.595.316)</b>	<b>(4,14)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>19.871.495.134</b>	<b>17.596.610.610</b>	<b>(2.274.884.524)</b>	<b>(12,51)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	10.493.997	8.933.000	(1.560.997)	(14,91)
Pembiayaan Sementara Dikawat	3.221.347	377.300	(2.844.047)	(224,77)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>13.715.344</b>	<b>9.310.300</b>	<b>(4.405.044)</b>	<b>(32,12)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>13.715.344</b>	<b>9.310.300</b>	<b>(4.405.044)</b>	<b>(32,12)</b>
<b>Ekuitas</b>				
<b>Ekuitas</b>				
Ekuitas	16.056.714.290	17.596.726.711	(1.490.012.421)	(9,05)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.056.714.290</b>	<b>17.596.726.711</b>	<b>(1.490.012.421)</b>	<b>(9,05)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.056.714.290</b>	<b>17.596.726.711</b>	<b>(1.490.012.421)</b>	<b>(9,05)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>19.871.495.134</b>	<b>17.596.610.610</b>	<b>(2.274.884.524)</b>	<b>(12,51)</b>

Keseluruhan:  
RALS

Bangka, 27 Januari 2026  
Perwakilan Jarak Jauh  
Rusia Pengawasan Anggaran

PERwakilan RUSIA  
NIP. 197004190000000000



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Neraca Percobaan (Basis AkruaI)

Per 31 Desember 2025

**NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : 006 (NAMA/NAMA ASING)  
 UNIT ORGANISASI : 01 (SADAN ORGANISASI ADMINISTRASI)  
 WILAYAH/KAWASAN : 0000 (DI YOGYAKARTA)  
 SATUAN KERJA : 000171 (PENGADILAN NEGARA PARTIAL)

Tgl Cetak : 27/01/26 9:22 AM

Tgl Cetak : 27/01/26 9:23 PM

Halaman : 1

No. laporan percobaan: annual\_satuan\_skr

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
00	11111	Beban Karyawan	11.000.000	0
00	11115	Beban untuk Pemeliharaan	980.000	0
00	11116	Tanah	11.000.000.000	0
00	11211	Pembelian dan Biaya	1.000.000.000	0
00	11212	Gedung dan Bangunan	1.000.000.000	0
00	11215	Aset Tetap Lainnya	40.000.000	0
00	11216	Akumulasi Penyusutan Pembelian dan Biaya	0	1.040.000.000
00	11217	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	6.700.000.000
00	21212	Beban asuransi yang masih harus dibayar	0	10.000.000
00	21215	Pembayaran Sewa Eksternal di Muka	0	5.000.000
00	21216	Gedung dan Bangunan	0	6.000.000.000
00	21221	Gedung dan Bangunan Lain	0	10.000.000
00	21222	Tanah dan Bangunan	0	10.000.000
00	21223	Beban	0	21.000.000.000
00	21224	Gedung dan Bangunan Lain	980.000.000	0
00	41101	Pembayaran Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	400.000
00	41102	Pembayaran Penggantian Sewa dan Pemeliharaan untuk Bangunan	0	11.000.000
00	41103	Beban Sg Pajak PPh	1.000.000.000	0
00	41104	Beban Pembelian Sg PPh	44.000	0
00	41105	Beban Terg. Karyawan PPh	210.000.000	0
00	41106	Beban Terg. Sewa PPh	80.000.000	0
00	41107	Beban Terg. Bangunan PPh	30.000.000	0
00	41108	Beban Terg. Peralatan PPh	90.000.000	0
00	41109	Beban Terg. PPh PPh	10.000.000	0
00	41110	Beban Terg. Sewa PPh	80.000.000	0
00	41111	Beban Terg. Bangunan PPh	400.000.000	0
00	41112	Beban Terg. Sewa PPh	1.000.000	0
00	41113	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41114	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41115	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41116	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41117	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41118	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41119	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41120	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41121	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41122	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41123	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41124	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41125	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41126	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41127	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41128	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41129	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41130	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41131	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41132	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41133	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0
00	41134	Beban Terg. Sewa PPh	400.000.000	0





Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

# Neraca Percobaan (Basis Kas)

Per 31 Desember 2025

## NERACA PERCOBAAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 001 ) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 MELAYAN PEWANGI : ( 0000 ) DI YOGYAKARTA  
 SATUAN KERJA : ( 000002 ) PENGADILAN NEGARA BANTUL

Tgl Data : 20251203 0:00 AM

Tgl Cetak : 20251203 0:04 PM

Halaman : 1

lap neraca percobaan kas saldo per:

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
01	50110	OPERASIONAL ENTITAS LAIN	0	3,307,438,441
01	50121	OPERASIONAL ENTITAS LAIN	10,301,242	0
10	40121	Pembelian Sewa Gedung, Gasing, dan Angkutan	0	2,371,341
10	40151	Pembelian Peralengkapan Sarana dan Peralengkapan Keseluruhan	0	12,140,000
10	50101	Salah satu bagian PNE	2,057,040,400	0
10	50102	Salah satu bagian PNE	44,440	0
10	50103	Salah satu bagian PNE	215,300,000	0
10	50105	Salah satu bagian PNE	60,710,000	0
10	50106	Salah satu bagian PNE	30,300,000	0
10	50104	Salah satu bagian PNE	100,700,000	0
10	50105	Salah satu bagian PNE	10,301,242	0
10	50106	Salah satu bagian PNE	60,307,000	0
10	50108	Salah satu bagian PNE	90,000,000	0
10	50101	Salah satu bagian PNE	11,300,000	0
10	50104	Salah satu bagian PNE	40,000,000	0
10	50106	Salah satu bagian PNE	2,700,000,000	0
10	50101	Salah satu bagian PNE	110,000,000	0
10	50102	Salah satu bagian PNE	2,120	0
10	50101	Salah satu bagian PNE	4,300,000	0
10	50102	Salah satu bagian PNE	2,100,000	0
10	50108	Salah satu bagian PNE	4,000,000	0
10	50101	Salah satu bagian PNE	30,000,000	0
10	50101	Salah satu bagian PNE	7,200,000	0
10	50111	Salah satu bagian PNE	407,000,000	0
10	50114	Salah satu bagian PNE	8,140,000	0
10	50115	Salah satu bagian PNE	50,000,000	0
10	50120	Salah satu bagian PNE	300,000	0
10	50102	Salah satu bagian PNE	700,000	0
10	50101	Salah satu bagian PNE	81,000,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	1,001,100	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	2,100,000	0
10	50111	Salah satu bagian PNE	8,000,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	300,000,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	50,100,000	0
10	50111	Salah satu bagian PNE	60,707,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	8,500,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	1,700,000	0
10	50110	Salah satu bagian PNE	0	300

## NERACA PERCOBAMAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA LINGKARAN : ( 001 ) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 000 ) DI YOGYAKARTA  
 SATUAN KERJA : ( 40072 ) PENGADILAN NEGARA BANTUL

Tgl Data : 31/12/25 0:30 AM

Tgl Cetak : 31/12/25 3:24 PM

Halaman : 2

lap neraca percobaan kas saldo per:

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
<b>Jumlah</b>			<b>0,017,700,000</b>	<b>0,017,700,000</b>

Revisi/ang:

TRN

Bantul, 27 Januari 2026

Penanggung Jawab UARPA

Kedua Pengantar Anggaran

  
 DWYH0101000001, E. Kus

NPI 1000041020004 002



# PENGADILAN NEGERI BANTUL

---

Jl. Prof. Dr. Supomo, Sh No.4, Mandingan, Ringinharjo,  
Kec. Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa  
Yogyakarta

The bottom of the page features several overlapping, wavy lines in various shades of teal and light blue, creating a modern, abstract design.